

**LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**PENGEMBANGAN MODUL AJAR ETIKA PROFESI GURU PPKN DALAM
DIGITAL NATIVE TEACHER TERHADAP PENINGKATAN
KETERAMPILAN LITERASI KEWARGAAN SISWA**

TIM PENGUSUL

Jamaludin, S.Pd., M.Pd	NIDN : 0119028807
Dr. Sri Yunita, S.Pd., M.Pd.	NIDN : 0008067008
Oksari A. Sihaloho, M.Pd	NIDN : 0015109404
Syuratty Astuti Rahayu Manalu, S.Pd., S.H,MH.	NIDN : 0025048306
Budi Ali Mukmin, S.I.P, M.A.	NIDN : 0017048202

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PRODUK TERAPAN

1. Judul Penelitian : Pengembangan Modul Ajar Etika Profesi Guru PPKn Dalam Digital Native Teacher Terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan Siswa
2. Bidang Ilmu : PPKn
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Jamaludin, S.Pd., M.Pd.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/ NIDN : 198802192019031011
 - d. Disiplin Ilmu : PPKn
 - e. Pangkat/ Golongan : III/c
 - f. Jabatan : Lektor
 - g. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial
 - h. Alamat : Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate, Medan
 - i. Telpn/ Faks/ E-mail : 082333303311/jamaludin@unimed.ac.id
 - j. Alamat Rumah : Jl. Gambir pasar 8 nomor 605 A Sei Rotan, Percut Sei Tuan
 - k. Telpn/ Faks/ E-mail : 082333303311/jamaludin@unimed.ac.id
4. Jumlah Anggota Peneliti : 4

Nama Anggota Peneliti dan NIDN : 1. Dr. Sri Yunita, S.Pd., M.Pd. — 197006082006042002

: 2. Oksari Anastasya Sihalohe, M.Pd. — 199410152022032020

: 3. Syuratty Astuti Rahayu Manalu, S.Pd., S.H., M.H. — 198304252024212015

: 4. Budi Ali Mukmin, S.I.P., M.A. — 198204172010121001

Nama dan NIM Mhs yang terlibat : 1. 3221111013 — FAHRYSYAH AULYA

: 2. 3223311014 — BERTANIA PERMATA SARI

: 3. 3223111057 — ADELINA SITANGGANG

: 4. 3223311010 — DYNA M T PASARIBU

: 5. 3222411005 — MIRA CAHYA
5. Lokasi Penelitian : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.
- Jumlah Biaya Penelitian : Rp 40.150.000



Medan, 29-10-2025

Ketua Peneliti

Jamaludin, S.Pd., M.Pd.
198802192019031011

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari tantangan etika profesi guru PPKn, dengan lebih dari 1.200 kasus pelanggaran etika profesi guru hasil laporan Evaluasi Kinerja Pendidikan Nasional Tahun 2022. Sebagian besar kasus ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang kode etik profesi. Guru PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa berdasarkan nilai Pancasila. Namun, modul ajar yang tersedia sering kali generik dan tidak relevan dengan kebutuhan guru di era digital. Tujuan penelitian adalah mengembangkan modul ajar etika profesi guru PPKn berbasis nilai Pancasila untuk calon guru PPKn yang tergolong digital native teacher, guna meningkatkan literasi budaya dan kewargaan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) model Borg & Gall, meliputi analisis kebutuhan, desain, validasi, uji coba, revisi, dan implementasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Luaran yang diharapkan adalah modul pelatihan etika profesi yang relevan, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Targetnya adalah calon guru PPKn mampu menjadi inovator dan inspirator dalam meningkatkan literasi kewargaan, serta menjadikan siswa lebih siap menghadapi tantangan globalisasi. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang diusulkan adalah 5, mencakup tahap validasi modul melalui uji coba lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengembangan modul ajar etika profesi guru PPKn berbasis nilai Pancasila meningkatkan kompetensi generasi digital native teacher. Hasil uji coba menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman mahasiswa calon guru, yang dibuktikan dengan kenaikan nilai rata-rata dari 78.69 menjadi 85.84. Validasi ahli dan uji pengguna mengonfirmasi kelayakan modul ajar dengan skor rata-rata sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa modul ajar tersebut efektif dan relevan dalam membekali calon guru dengan kompetensi etika digital, yang pada gilirannya memproyeksikan penguatan literasi kewargaan siswa berbasis nilai-nilai Pancasila. Modul ini berfungsi sebagai jembatan antara teori etika profesi dan praktik nyata guru di era digitalisasi. Saran yang diberikan mencakup integrasi kurikuler, diseminasi melalui AP3KnI, dan penelitian lanjutan untuk mengkaji dampak jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya memajukan pendidikan karakter di era digital melalui pengembangan profesionalisme guru.

Kata Kunci: Etika Profesi; Literasi Kewargaan; Digital Native Teacher.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Terapan dengan judul “*Pengembangan Modul Ajar Etika Profesi Guru PPKn dalam Digital Native Teacher terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan Siswa*” tepat pada waktunya. Penelitian terapan ini merupakan kegiatan penelitian internal Universitas Negeri Medan (UNIMED) tahun 2025 yang diselenggarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMED.

Pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam dunia pendidikan. Konsekuensinya, guru khususnya para digital *native teacher*, dituntut untuk tidak hanya menguasai teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga memahami dan menerapkan etika profesi dalam setiap interaksi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk menghasilkan sebuah produk pembelajaran yang mampu menjembatani kebutuhan tersebut, yaitu modul ajar yang efektif dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengembangkan inovasi pembelajaran pada bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam mempersiapkan guru PPKn yang kompeten, adaptif, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai profesionalisme di era digital. Melalui penelitian ini diharapkan tersusun modul ajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 serta mampu meningkatkan keterampilan literasi kewargaan siswa secara efektif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait yang berkontribusi dalam pembuatan laporan akhir penelitian, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd. selaku Rektor UNIMED
2. Ibu Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M. Hum. selaku Ketua LPPM UNIMED
3. Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si. selaku Dekan FIS UNIMED
4. Para peneliti yang telah bekerja dengan baik dalam penyelesaian laporan akhir penelitian ini

5. Para dosen pengampu mata kuliah di jurusan PPKn FIS UNIMED dan para mahasiswa yang telah bekerjasama dengan peneliti, sehingga terselesaikannya laporan akhir penelitian ini.

Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman. Masukan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan karya ini di masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Namun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan modul ajar bagi *digital native teacher*, serta menjadi referensi tambahan bagi pendidik, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada bidang serupa.

Medan, Oktober 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Modul Ajar.....	8
B. Etika Profesi Guru PPKn.....	10
C. Literasi Kewargaan.....	13
D. Penelitian Yang Relevan	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	17
B. Bagan Alir Penelitian	18
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
D. Subyek Penelitian	19
E. Instrumen Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data	19
F. Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan	34
C. Luaran Yang Dicapai.....	37
D. Rencana Selanjutnya	37
BAB V PENUTUP	39
A. Simpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
DAFTAR LAMPIRAN	43

Lampiran 1. Kontrak Penelitian	43
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	48
Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian	49
Lampiran 4. Luaran Penelitian.....	50
Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket validasi ahli	19
Tabel 4.1 Kisi-Kisi Modul Ajar.....	23
Tabel 4.2 Hasil validasi ahli media dan konten PKN.....	25
Tabel 4.3 Uji Validas ke Ahli.....	27
Tabel 4.4 Hasil Uji Pengguna.....	28
Tabel 4.5 Uji Valiasi kepada mahasiswa.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Research and Development	17
Gambar 3.2. Tahapan Penelitian	18
Gambar 4.1 Hasil Pre Test.....	30
Gambar 4.2 <i>Treatment</i> Uji Kefektifan Produk Modul Ajar	31
Gambar 4.3 Mahasiswa mengisi post test	32
Gambar 4.4 Hasil Post Test	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, fenomena pelanggaran etika profesi yang melibatkan guru menjadi tantangan dalam menjaga citra profesi pendidik. Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Pendidikan Nasional Tahun 2022, tercatat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran etika profesi di kalangan guru. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakdisiplinan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Di sisi lain, laporan dari *Lembaga Ombudsman Pendidikan Nasional* (2023) menunjukkan bahwa 65% pelanggaran etika guru disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kode etik profesi, pelanggaran etika di kalangan guru mencakup ketidakprofesionalan, konflik kepentingan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan penguatan kompetensi etika profesi di kalangan guru PPKn. Dalam konteks pendidikan nasional, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai substansi materi, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku etis. Kode etik profesi guru merupakan pedoman sekaligus landasan moral bagi seorang guru dalam berperilaku profesional (Indriawati et al., 2023). Sebagai pendidik yang bertugas mengajarkan nilai-nilai Pancasila, guru PPKn memiliki tanggung jawab ganda dalam menginternalisasi etika kepada peserta didik.

Di era keterbukaan akses informasi dan komunikasi, maka seorang guru dituntut menjadi pemandu dalam petualangan siswa untuk menjelajah memahami dunia di sekitar mereka, termasuk keberagaman budaya dan nilai-nilai kehidupan sebagai warga negara (Prayetno et al., 2022), maka seorang guru yang memiliki literasi

budaya dan kewargaan yang baik, ibarat seorang pemandu wisata yang handal. Ia tidak hanya mengenalkan berbagai tempat menarik, tetapi juga menjelaskan makna dan sejarah di balik setiap tempat tersebut. Begitu pula dalam proses pembelajaran, guru yang memahami budaya dan kewargaan dengan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata dan bermakna, maka guru dapat memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pelajaran seperti budaya dan nilai-nilai local

Menjadi guru PPKn memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter siswa, melalui penguatan literasi budaya dan kewargaan dapat mendorong siswa untuk mengembangkan sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong. nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab (Jamaludin et al., 2021).

Di era globalisasi, guru PPKn memiliki tantangan dalam mempersiapkan siswa (warga negara hipotetik) untuk menjadi pemimpin di masa depan, siswa perlu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, suku dan agama sehingga dibutuhkan kemampuan dalam membangun nalar kewarganegaraan (Jamaludin, 2020). Literasi budaya dan kewargaan sebagai upaya untuk membekali nalar warganegara siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan di masa depan sebagai pribadi yang matang dan siap berdaya guna, daya hasil dan daya saing.

Dalam tiga tahun terakhir, penelitian tentang etika profesi guru menunjukkan beberapa temuan penting. (Nofriyanti & Nurhafizah, 2019) untuk mewujudkan kualitas pembelajaran yang baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi professional guru, dan menerapkan etika profesional guru. (Maghfiroh & Eliza, 2021) pelaksanaan tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari para guru karena mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. (Sutiono, 2021) profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai,

tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Sementara itu guru professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis.

Etika profesi menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi etika guru PPKn. Namun modul ajar yang tersedia sering kali kurang relevan dengan kebutuhan spesifik guru PPKn di era digitalisasi khususnya pada konteks digital native teacher. Mahasiswa PPKn calon kategori digital native teacher memiliki tuntutan menjadi guru yang inovatif dan inspiratif, mampu mencetak generasi muda khususnya siswa dalam literasi kewargaan yang cerdas dan siap menghadapi masa depan.

Konten kewarganegaraan mengalami perkembangan yang signifikan karena pengaruh era perubahan yang cepat (Yunita, 2022a). Sebagai mahasiswa PPKn yang akan menjadi calon guru di era digital akan menghadapi tantangan dan peluang dengan menggabungkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga membutuhkan kreativitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Tantangan utamanya adalah merancang pembelajaran yang menarik dan relevan, mengatasi kesenjangan digital, serta menjaga relevansi materi PPKn di tengah arus informasi yang deras dalam hal ini berkaitan dengan literasi kewargaan (Yunita & Tambunan, 2021).

Peluang lain dalam digital native teacher adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal, serta mengakses sumber belajar yang tak terbatas tentunya berkaitan dengan teknologi. Dengan menguasai berbagai platform digital dan keterampilan pedagogi, guru PPKn yang inovatif dan menginspirasi bagi siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Pembelajaran kewarganegaraan di era 4.0 memerlukan kesiapan dan pematapan sebagai pengguna (dosen dan mahasiswa) (Yunita, 2022a), pada platform digital berbasis internet Oleh

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul ajar yang berfokus pada kebutuhan praktis dan kontekstual etika profesi guru PPKn sebagai *digital native teacher* dalam meningkatkan literasi kewargaan siswa.

Era digitalisasi yang menyebabkan perubahan, khususnya dalam bidang pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak jarang membawa dampak bagi dunia pendidikan. Dampak yang diberikan tidak hanya bersifat positif, namun perubahan tersebut juga membawa dampak yang bersifat negatif. Tuntutan perbaikan serta pembaharuan strategi dalam dunia pendidikan pun semakin kompleks. Pendidikan saat ini tidak hanya diharapkan mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan saja, melainkan juga keterampilan serta kualitas moral yang baik (Yunita, 2022b). Alasan peneliti menawarkan pengembangan modul ajar etika profesi guru PPKn yang ditujukan untuk *digital native teacher* karena memiliki urgensi yang sangat tinggi di tengah lanskap pendidikan saat ini. Era digitalisasi membawa perubahan fundamental dalam cara siswa belajar dan berinteraksi sebagai warga negara. Oleh karena itu, memastikan guru PPKn, khususnya mereka yang merupakan generasi *digital native*, memiliki pemahaman dan keterampilan etika profesi yang kuat menjadi krusial untuk meningkatkan literasi kewargaan siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah hasil dari pengembangan modul ajar etika profesi guru PPKn dalam *digital native teacher* terhadap peningkatan keterampilan literasi kewargaan siswa. Modul ajar dijadikan *win win solution* karena dirancang untuk pembelajaran mandiri (*self-instructional*). Ini sangat cocok untuk guru, terutama *digital native teacher* dengan pertimbangan fleksibilitas waktu dalam belajar. Mereka bisa mengakses modul kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini memungkinkan proses peningkatan kompetensi yang berkelanjutan tanpa harus terikat jadwal pelatihan formal yang kaku. Selanjutnya modul ajar memiliki struktur yang jelas dan fokus pada materi yang dijabarkan terhadap kompetensi tertentu. Keteraturan ini memastikan bahwa materi disajikan secara logis, dari konsep dasar hingga aplikasi praktis, sehingga memudahkan calon

guru PPKn untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika tersebut sebagai user pada konteks *Digital native teacher*. Modul ajar ini dikembangkan dalam format digital (e-modul) dapat diintegrasikan dengan berbagai fitur multimedia seperti video, simulasi, kuis interaktif, dan forum diskusi daring. Ini sesuai dengan gaya belajar *digital native* yang lebih visual, interaktif, dan terkoneksi, membuat proses belajar etika menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah hasil dari pengembangan modul ajar etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan literasi kewargaan siswa. Lebih spesifik masalah tersebut dijabarkan dengan perumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kebutuhan calon guru PPKn sebagai digital native teacher terhadap modul ajar etika profesi PPKn?
2. Bagaimana proyeksi literasi kewargaan siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi?
3. Bagaimana efektivitas modul ajar pelatihan etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model Borg & Gall dengan tujuan untuk mengembangkan modul pelatihan etika profesi berbasis nilai Pancasila dalam literasi kewargaan siswa yang relevan dengan kebutuhan guru PPKn sebagai digital native teacher. Maka berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebutuhan calon guru PPKn sebagai digital native teacher terhadap modul ajar etika profesi PPKn.

2. Mengidentifikasi proyeksi literasi kewargaan siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi.
3. Menganalisis efektivitas modul ajar pelatihan etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan literasi kewargaan siswa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memperhatikan beberapa studi terdahulu yang menunjukkan (Baskara & Sutarni, 2024) perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, khususnya dalam integrasi teknologi pendidikan. modul pelatihan generik kurang spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. (Kurniawan, 2018) Profesionalisme guru Pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk aktif mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. (Manik et al., 2024) Di tengah kemajuan teknologi tantangan seperti dehumanisasi interaksi pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, dan lemahnya implementasi nilai-nilai etika menjadi isu yang harus diatasi. Modul ajar etika profesi keguruan masih bersifat general belum spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. Dalam kajian etika profesi belum terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila yang mengarah pada literasi kewargaan secara spesifik dihubungkan dengan guru di era digital atau disebut dengan digital native teacher.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena memfokuskan pada pengembangan modul yang spesifik untuk guru PPKn sebagai digital native teacher dengan integrasi teknologi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara literasi budaya dan kewargaan siswa dengan kebutuhan praktis guru dalam pengembangan modul pelatihan yang terintegrasi dengan nilai Pancasila dan dirancang untuk digital native teacher di era digitalisasi. Pendekatan berbasis literasi kewargaan sebagai landasan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi tantangan global. Pemanfaatan metode berbasis teknologi dalam pelatihan etika profesi, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Fokus pada peningkatan keberlanjutan melalui evaluasi terintegrasi, menjadikan modul lebih aplikatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis; berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di jurusan PPKn dengan memperkaya khazanah ilmu pada kajian etika profesi guru, dan literasi kewargaan di era digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kerangka konseptual baru mengenai integrasi etika profesi guru dan literasi kewargaan dalam konteks digital native teacher. Selanjutnya kajian penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan awal bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan studi serupa atau lebih mendalam terkait pengembangan modul ajar dan peningkatan literasi digital siswa.
- b. Manfaat Praktis; Bagi calon Guru PPKn khususnya Mahasiswa PPKn dapat menjadi panduan awal dalam memahami pentingnya etika profesi dalam konteks digital, serta memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan dan menggunakan modul ajar etika profesi yang relevan dengan kebutuhan siswa di era digital dan menjadikan kesadaran akan peran mereka sebagai agen perubahan dalam membentuk literasi kewargaan siswa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagi Guru PPKn menjadi rujukan yang mendasar untuk pengembangan program pelatihan atau workshop mengenai pengembangan modul ajar berbasis digital. Bagi siswa, membantu dalam upaya pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila dan literasi kewargaan di era digital. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital. Bagi LPTK yaitu Membantu LPTK dalam menghasilkan lulusan guru PPKn yang siap menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan mampu meningkatkan literasi kewargaan siswa. Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan, memberikan data dan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan profesionalisme guru, kurikulum pendidikan, dan peningkatan literasi digital di sekolah serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Modul Ajar

Modul ajar merupakan bagian penting dari implementasi Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam paradigma baru ini, guru tidak lagi dibatasi oleh format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kaku, melainkan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modul ajar hadir sebagai dokumen pembelajaran yang bersifat fleksibel, lengkap, dan mudah diadaptasi. RPP mencakup komponen-komponen penting seperti tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, asesmen, hingga lampiran pendukung yang membantu guru dalam merancang pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Pengembangan modul ajar didasarkan pada prinsip-prinsip desain instruksional yang sistematis. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) sebagaimana dijelaskan oleh (Branch, 2009). Proses ini dimulai dengan analisis kebutuhan pembelajaran, perancangan tujuan dan strategi, pengembangan materi ajar, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi terhadap efektivitas modul. Dengan mengikuti proses ini, modul ajar disusun secara terarah dan menyeluruh.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, modul ajar juga dirancang untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat menyesuaikan dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar siswa yang beragam. Modul ajar tidak hanya dirancang untuk menyampaikan konten, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan reflektif. Oleh karena itu, aspek keterpaduan antar komponen sangat penting. Modul yang baik harus mampu menghubungkan antara kompetensi yang ingin dicapai, aktivitas pembelajaran yang kontekstual, serta asesmen yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Selain itu, materi yang disajikan dalam modul sebaiknya relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mendorong mereka untuk berpikir

kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan konstruktivis, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam membangun pengetahuannya (Joyce, 2011).

Seiring dengan perkembangan teknologi, modul ajar pun mengalami perluasan bentuk ke dalam platform digital. Modul ajar digital memanfaatkan kekuatan teknologi informasi untuk memperkaya konten pembelajaran melalui berbagai fitur seperti video, audio, animasi, simulasi, serta asesmen interaktif. Adaptasi ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak terbatas ruang dan waktu. Konsep ini sejalan dengan teori Multimedia Learning yang dikembangkan oleh (Mayer, 2009), yang menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika siswa menerima informasi melalui saluran visual dan auditori secara bersamaan dalam bentuk yang saling mendukung. Meski memiliki potensi yang besar, adaptasi modul ajar ke dalam bentuk digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan akses terhadap perangkat dan jaringan internet. Tidak semua siswa memiliki fasilitas digital yang memadai untuk mengakses modul digital secara optimal. Selain itu, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi digital yang cukup untuk menyusun, mengelola, dan mengembangkan modul ajar digital secara mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pelatihan dan penguatan kapasitas guru agar modul digital dapat digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran.

Namun demikian, potensi modul ajar digital tetap sangat besar. Modul ini memungkinkan fleksibilitas belajar, di mana siswa dapat mengakses materi kapan saja dan mengulanginya sesuai kebutuhan. Di samping itu, format digital juga memungkinkan integrasi berbagai pendekatan pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), hingga pembelajaran berbasis literasi digital. Dengan dukungan kebijakan pendidikan dan kesiapan teknologi yang memadai, modul ajar digital bisa menjadi pilar penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Secara teoritis, modul ajar berakar pada pendekatan sistem pembelajaran atau Instructional System Design (ISD) yang menekankan pentingnya hubungan antara tujuan pembelajaran, materi, strategi, media, dan evaluasi. Pengembangan bahan ajar, seluruh komponen

tersebut harus saling mendukung dan tidak berdiri sendiri. Pendekatan ini menekankan bahwa desain pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran (Heinich, 2002).

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, prinsip-prinsip ini semakin relevan karena modul ajar tidak hanya menjadi pedoman teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk mengaktualisasikan filosofi merdeka belajar yang berpusat pada siswa. Dengan demikian, modul ajar merupakan wujud konkret dari upaya membangun pembelajaran yang adaptif, mandiri, dan bermakna. Modul ini memungkinkan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan berdaya guna, sekaligus menjawab tantangan zaman yang menuntut pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Ke depan, pengembangan modul ajar yang berkualitas baik dalam format cetak maupun digital akan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, transformatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21.

B. Etika Profesi Guru PPKn

Dalam dunia pendidikan, keberadaan guru bukan sekadar sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan, melainkan sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membentuk karakter peserta didik. Di sinilah letak pentingnya pemahaman tentang etika profesi guru, terutama bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Secara konseptual, etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, moralitas, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Etika tidak hanya berbicara tentang apa yang benar dan salah, tetapi juga menuntun manusia dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara bermartabat. Sementara itu, profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai luhur yang melekat pada tugas tersebut. Dengan demikian, etika profesi merujuk pada norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku para profesional dalam menjalankan tugasnya, agar tetap berlandaskan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, serta integritas.

Dalam konteks guru, etika profesi menjadi aspek fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari tugas dan fungsinya di sekolah maupun di masyarakat. Guru memiliki peran tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, dan panutan yang diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap guru dituntut untuk memahami dan menerapkan etika profesinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peserta didik, sesama rekan kerja, lembaga pendidikan, serta bangsa dan negara. Pentingnya etika profesi guru ditegaskan dalam berbagai literatur pendidikan, di mana guru dianggap sebagai profesi moral yang memiliki implikasi luas terhadap pembentukan karakter dan identitas sosial generasi muda (Purwanto, 2017). Sebagai bentuk pengaturan norma moral dalam profesi guru, Indonesia memiliki Kode Etik Guru Indonesia yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kode etik ini menjadi landasan moral sekaligus pedoman perilaku guru dalam menjalankan profesinya secara profesional.

Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, pengabdian, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kode Etik Guru Indonesia menekankan bahwa guru harus menjadi agen perubahan sosial yang berintegritas dan menjunjung tinggi martabat profesinya. Guru juga diharapkan menghormati hak asasi peserta didik, menjalin hubungan profesional yang sehat dengan rekan sejawat, serta menjaga nama baik lembaga pendidikan tempat mengabdikan. Dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), etika profesi guru memiliki kekhususan tersendiri. Guru PPKn bukan hanya mentransfer pengetahuan mengenai konstitusi, lembaga negara, dan norma hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk watak kebangsaan peserta didik. PPKn adalah mata pelajaran yang secara langsung berkaitan dengan pembinaan nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, guru PPKn harus memiliki integritas moral yang kuat agar dapat menjadi model nyata dari nilai-nilai yang diajarkannya. Relevansi etika profesi guru PPKn dengan nilai-nilai Pancasila sangatlah erat.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Guru PPKn,

sebagai agen pendidikan, harus menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi dalam bersikap dan bertindak. Dalam menjalankan tugasnya, guru PPKn harus menunjukkan sikap religius yang sesuai dengan sila pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti empati dan toleransi yang sejalan dengan sila kedua, menanamkan semangat persatuan seperti pada sila ketiga, meneladankan praktik demokrasi dalam pembelajaran yang mencerminkan sila keempat, serta mengembangkan rasa keadilan sosial yang tercermin dalam sikap adil terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, yang sejalan dengan sila kelima. Guru PPKn juga memikul tanggung jawab sebagai agen internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam dan di luar kelas. Peran ini tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk pengajaran kognitif semata, tetapi harus diwujudkan secara konkret melalui keteladanan moral, perilaku santun, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika guru PPKn menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkannya, maka akan terjadi krisis kepercayaan dari peserta didik terhadap pelajaran PPKn itu sendiri. Oleh karena itu, guru PPKn harus mampu menjadi representasi nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari baik sebagai pendidik di sekolah maupun sebagai warga negara di tengah masyarakat.

Dalam penguatan profesionalisme dan etika guru PPKn, pendekatan berbasis nilai dan karakter sangat penting untuk diterapkan secara konsisten. Guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai teladan moral dan kebangsaan. Ini berarti guru PPKn harus menjadi figur yang konsisten antara kata dan perbuatan, memiliki kepedulian terhadap keutuhan bangsa, serta mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat demokrasi dalam diri peserta didik. Kajian teoritis mengenai etika profesi guru, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, telah banyak dijelaskan oleh para pakar. (Tilaar, 2009) menegaskan bahwa guru adalah agen perubahan yang tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang bermartabat, demokratis, dan berkeadilan. Senada dengan itu, (Susanto, 2019) menjelaskan bahwa guru PPKn memiliki misi ideologis dalam menanamkan nilai-nilai dasar negara melalui pendidikan yang berkarakter dan transformatif. Dengan demikian, etika profesi guru PPKn tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusional

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun warga negara yang bertanggung jawab.

C. Literasi Kewargaan

Dalam era digital saat ini, literasi kewargaan (*civic literacy*) tidak lagi terbatas pada pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara secara konvensional. Literasi kewargaan kini mencakup pula kemampuan individu untuk memahami, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik yang berlangsung secara digital. Transformasi digital telah mengubah cara warga negara berinteraksi, mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, hingga mengambil bagian dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap literasi kewargaan digital menjadi penting, terutama bagi generasi digital native yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang telah terpapar teknologi sejak usia dini. Konsep digital native pertama kali diperkenalkan oleh (Prensky, 2001) untuk menggambarkan generasi yang lahir setelah berkembangnya teknologi digital, khususnya internet.

Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan gawai, media sosial, aplikasi, dan perangkat digital lainnya. Mereka memiliki karakteristik kognitif dan perilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya yang disebut digital immigrant yakni generasi yang lahir sebelum era digital dan harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi secara perlahan. Digital native secara umum ditandai oleh kecepatan dalam mengakses dan mengolah informasi, multitasking, berpikir visual, serta ketergantungan tinggi pada teknologi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka terbiasa dengan koneksi real-time, interaktivitas, dan penggunaan media sosial sebagai ruang sosial baru. Dalam konteks pendidikan, kehadiran digital native memunculkan paradigma baru, baik dari sisi peserta didik maupun pendidik. Ketika guru juga merupakan bagian dari generasi digital native, maka muncul istilah digital native teacher yakni guru yang tidak hanya menguasai konten pembelajaran, tetapi juga mahir dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar.

Sebagai digital native teacher, pendidik memiliki potensi besar untuk menciptakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan Learning

Management System (LMS), penggunaan platform video conference, pengembangan media interaktif, serta integrasi media sosial dalam tugas dan proyek pembelajaran menjadi bagian dari transformasi pendidikan abad ke-21. Inovasi semacam ini mendukung pendekatan blended learning dan student-centered learning, yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif, mandiri, dan kontekstual. Digital native teacher juga dapat memfasilitasi penguatan literasi kewargaan digital, yaitu kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam ruang digital secara kritis, bertanggung jawab, dan etis. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah fenomena kecanduan gadget yang mengganggu konsentrasi dan kesehatan mental siswa.

Kecenderungan siswa untuk terlibat dalam aktivitas *cyberloafing* yaitu mengakses media sosial atau situs hiburan saat proses belajar berlangsung juga menjadi hambatan dalam efektivitas pembelajaran digital. Selain itu, masih rendahnya kesadaran terhadap etika digital seperti plagiarisme, ujaran kebencian, privasi data, dan hoaks menimbulkan masalah baru dalam konteks literasi kewargaan. Literasi kewargaan dalam era digital menuntut pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan konsep hukum, konstitusi, dan pemerintahan, tetapi juga bagaimana peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara digital (*digital citizen*). Konsep digital *citizenship* ini meliputi tanggung jawab terhadap konten yang dibagikan, kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis, serta kesadaran terhadap etika berkomunikasi di dunia maya. Guru PPKn memiliki peran strategis dalam hal ini, yaitu sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk membangun karakter digital yang etis, kritis, dan berwawasan kebangsaan.

Dalam kajian teoritis, literasi kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pendidikan kewarganegaraan kritis (*critical civic education*) yang menekankan pentingnya kesadaran politik, partisipasi aktif, dan pemikiran reflektif. (Banks, 2008) menjelaskan bahwa *civic literacy* tidak hanya mencakup pengetahuan konstitusional, tetapi juga kompetensi sosial, empati, dan keterampilan deliberatif yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sementara itu, (Rheingold, 2012) menekankan pentingnya mindful participation dalam dunia digital,

di mana warga negara perlu memahami dampak sosial dan politik dari perilaku daring mereka. Dalam konteks Indonesia, penguatan literasi kewargaan digital sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan universal harus menjadi prinsip utama dalam membangun budaya digital yang sehat dan beradab. Guru, khususnya guru PPKn, harus mampu menjembatani pembelajaran antara norma-norma Pancasila dengan realitas sosial digital yang dihadapi siswa setiap hari.

Dengan demikian, literasi kewargaan dalam era digital bukan hanya tentang keterampilan menggunakan teknologi, tetapi lebih kepada kemampuan memahami hak, tanggung jawab, dan etika sebagai warga negara di ruang digital. Digital native teacher berperan penting dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Mereka menjadi aktor perubahan dalam membangun generasi yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, nilai kebangsaan, dan komitmen terhadap demokrasi yang sehat.

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini memperhatikan beberapa studi terdahulu yang menunjukkan (Baskara & Sutarni, 2024) perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, khususnya dalam integrasi teknologi pendidikan. modul pelatihan generik kurang spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. (Kurniawan, 2018) Profesionalisme guru Pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk aktif mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. (Manik et al., 2024) Di tengah kemajuan teknologi tantangan seperti dehumanisasi interaksi pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, dan lemahnya implementasi nilai-nilai etika menjadi isu yang harus diatasi. Modul ajar etika profesi keguruan masih bersifat general belum spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. Dalam kajian etika profesi belum terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila yang mengarah pada literasi kewargaan secara spesifik dihubungkan dengan guru di era digital atau disebut dengan digital native teacher.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena memfokuskan pada

pengembangan modul yang spesifik untuk guru PPKn sebagai digital native teacher dengan integrasi teknologi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara literasi budaya dan kewargaan siswa dengan kebutuhan praktis guru dalam pengembangan modul pelatihan yang terintegrasi dengan nilai Pancasila dan dirancang untuk digital native teacher di era digitalisasi. Pendekatan berbasis literasi kewargaan sebagai landasan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi tantangan global. Pemanfaatan metode berbasis teknologi dalam pelatihan etika profesi, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Fokus pada peningkatan keberlanjutan melalui evaluasi terintegrasi, menjadikan modul lebih aplikatif dan berkelanjutan.

BAB III

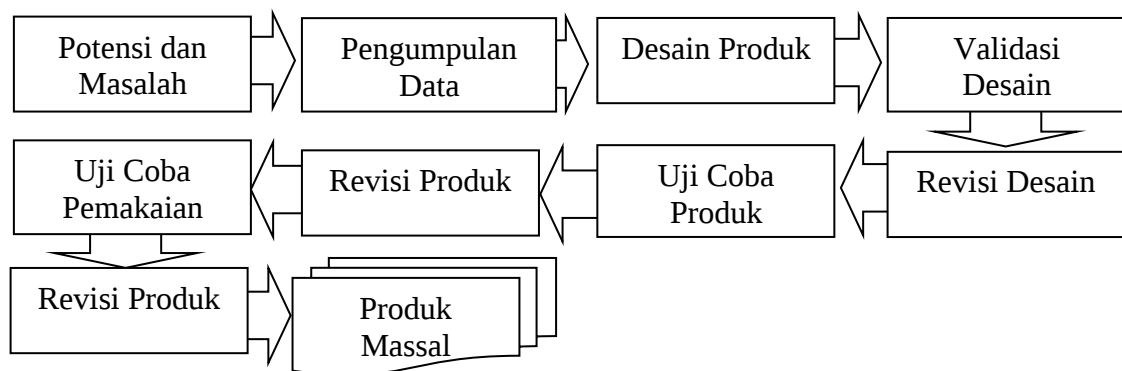
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini berupaya melakukan kajian isi dan modus dalam modul ajar etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan keterampilan literasi kewargaan siswa, optimalisasi penerapan perkuliahan etika profesi keguruan PKn berbasis digital native teacher dilakukan melalui research and development (R&D). Penelitian ini menggunakan model pengembangan dari Borg & Gall. Model pengembangan R&D merupakan penelitian “a process used to develop and validate educational product. which consist of studying research finding pertinent to the product to be developed, developing the product based on these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage” (Effendi & Hendriyani, 2018)

R&D merupakan penelitian kombinasi atau campuran (mixed methods approach) yang menggabungkan metode data kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan dan menguji efektivitas produk yang dikembangkan. Dalam pelaksanaannya, penelitian R&D ini mengikuti prosedur yang dikembangkan (P. Sugiyono, 2011):

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Research and Development

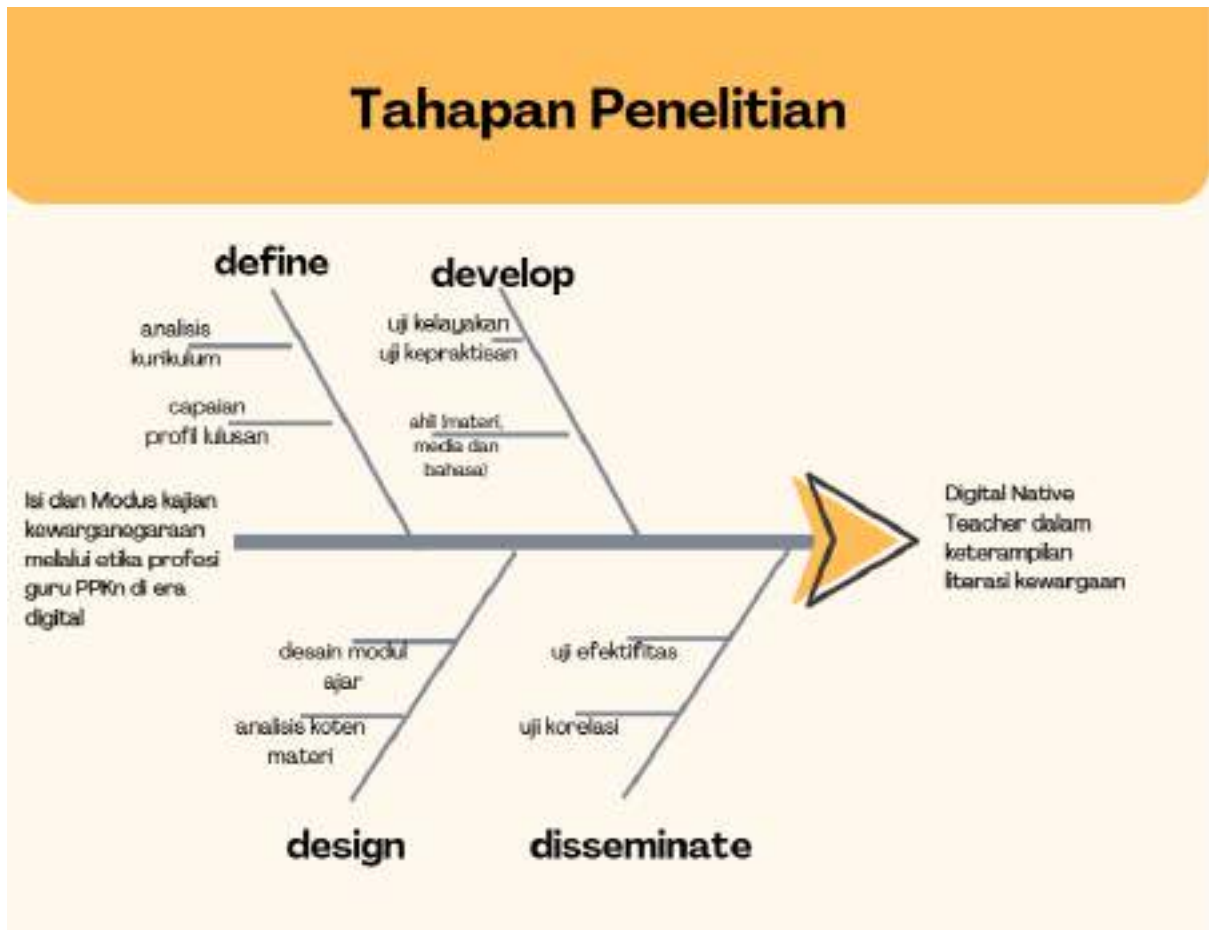


Sumber: Merujuk dari karya Sugiyono tahun 2011

B. Bagan Alir Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan menghasilkan tingkat keterapannya teknologi (TKT) yang berada pada tingkat 5 (lima). Luaran wajib penelitian berupa artikel di jurnal bereputasi internasional terindeks scopus minimal Quartile 4 (Q4). Prosiding internasional dan modul ajar ber-isbn yang digunakan di jurusan PPKn secara nasional melalui AP3KNI dan pencatatan ciptaan atas buku etika profesi keguruan PPKn. Untuk mencapai target dan luaran penelitian yang diharapkan sebagaimana TKT 5 (lima), penelitian dilakukan melalui tahapan alir di bawah ini:

Gambar 3.2. Tahapan Penelitian



C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian R&D ini dilakukan di jurusan PPKn FIS UNIMED. Pemilihan lokasi dilakukan karena berhubungan dengan road map fakultas dan jurusan terkoneksi dengan moto universitas yaitu *the character building university*. Waktu pelaksanaan penelitian 11 Juni sampai 31 Oktober 2025.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian meliputi: (1) dosen pengampu mata kuliah etika profesi guru sebagai mata kuliah inti pada Jurusan PPKn FIS Unimed; (2) mahasiswa sebagai kelompok uji coba; (2) 4 orang pakar validasi yang terdiri dari ahli dibidang bahasa, desain pemebelajaran, konten modul ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran.

E. Instrumen Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, lembar wawancara dan lembar observasi hasil belajar yang diisi berdasarkan hasil pengamatan dan perlakuan selama proses perkuliahan mengenai uji coba modul.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket validasi ahli

SUB KOMPONEN	BUTIR
1. Kelayakan Isi Modul	a. Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran
	b. Keterpaduan dan kejelasan penyajian materi
	c. Relevansi isi dengan kebutuhan peserta didik digital native
	d. Ketepatan penggunaan istilah dan bahasa
	e. Kesesuaian dengan karakteristik mata pelajaran PPKn
2. Tampilan dan Desain Modul	a. Tata letak dan desain modul menarik
	b. Pemanfaatan elemen digital
	c. Modul mudah digunakan secara

	mandiri/digital
3. Efektivitas Modul	a. Modul meningkatkan pemahaman tentang etika profesi guru
	b. Modul meningkatkan keterampilan literasi kewargaan siswa
	c. Modul meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi digital siswa

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: Pertama, angket digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan, efektivitas dan respon terhadap modul ajar. Kedua, tes digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengukuran yang objektif dan standar berkaitan peningkatan hasil belajar mahasiswa (Purwono et al., 2019). Ketiga, wawancara digunakan secara mendalam untuk mengeksplorasi data-data dari ahli untuk mendapatkan masukan terhadap produk, dan dari respon mahasiswa serta dosen setelah pelaksanaan perkuliahan (Sugiyono, 2010). Keempat, pengamatan digunakan untuk mengamati perkuliahan dengan menggunakan modul ajar dalam perkuliahan dan kegiatan penelitian lainnya (Creswell, 2015; S. Sugiyono, 2010). Kelima, studi dokumen, untuk kebijakan kurikulum, peraturan-perundangan dan dokumen lain yang relevan. Keenam, studi kepustakaan bertujuan untuk menghasilkan modul ajar yang tidak hanya empirical framework, tetapi juga menggunakan logical framework yang didukung oleh pandangan ahli dalam bentuk authoritative knowledge (Komariah, 2014).

F. Analisis Data

Teknik Analisis Data R&D dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mengadopsi model interaktif oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994) melalui langkah data collection; data reduction; data display; dan conclusion drawing & verification. Siklus analisis data prosesnya tidak sekali jadi, melainkan interaktif atau bolak balik dan perkembangannya bersifat sekuelitas dan interaktif Analisis data

kuantitatif dilakukan dengan: Analisis data deskriptif, analisis ditujukan untuk mengolah data angket hasil uji kelayakan dan kepraktisan terhadap modul ajar untuk mengoptimalkan penerapan perkuliahan berdasar pada keterampilan literasi kewargaan. Analisis efektivitas. untuk menganalisis nilai dari masing-masing mahasiswa yang diperoleh dari test pretest dan posttest pada kelas uji coba. Untuk menganalisis hasil penilaian yang diberikan oleh para ahli terhadap kualitas dan kelayakan produk, akan digunakan rumus Persentase Rerata Skor (PRS) berikut:

$$PRS = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 \%$$

Dengan kriteria :

90% ≤ PRS ≤ 100%	= Sangat Baik	(SB)
80% ≤ PRS ≤ 90%	= Baik	(B)
70% ≤ PRS ≤ 80%	= Cukup	(C)
60% ≤ PRS ≤ 70%	= Kurang	(K)
0% ≤ PRS ≤ 60%	= Sangat Baik	(SK)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan Modul Ajar Etika Profesi Guru Ppkn Dalam Digital Native Teacher Terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan Siswa. Proses pengembangannya terdiri dari empat langkah utama, yaitu: (1) pelaksanaan studi pendahuluan, (2) perancangan modul ajar (3) evaluasi dan uji coba produk, serta (4) pengujian efektivitas produk yang dikembangkan.

1. Tahapan Pertama: Penelitian Pendahuluan

Pengambilan data pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan sebelum pengembangan modul ajar dilakukan. Data ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran Etika Profesi Guru PPKn di era digital. Pengumpulan data pendahuluan dilakukan melalui dosen PPKn dan guru PPKn mengenai kebutuhan calon guru PPKn ditengah perkembangan teknologi dalam kompetensi siswa abad 21 yang sesuai dengan kaidah etika profesi guru PPKn. Melihat hasil pretest yang diberikan menunjukan bahwa perlu adanya penguatan yang dilakukan kepada mahasiswa PPKn sebagai calon guru PPKn, penguatan yang dilakukan terkait pada pemahaman dan keterampilan mahasiswa pada kode etik profesi guru, kompetensi-kompetensi sebagai seorang pengajar, memposisikan perkembangan digital dalam pembelajaran serta pengembangan soft skill pemanfaatn teknologi sebagai seorang guru sebagai *digital native teacher* untuk membentuk siswa yang memiliki literasi kewargaan ditengan tantangan zaman .

Maka dalam hal ini peneliti mencoba pengembangan modul ajar etika profesi guru PPKn yang ditujukan untuk *digital native teacher* karena memiliki urgensi yang sangat tinggi di tengah lanskap pendidikan saat ini. Era digitalisasi membawa perubahan fundamental dalam cara siswa belajar dan berinteraksi sebagai warga negara. Oleh karena itu, memastikan guru PPKn, khususnya mereka yang merupakan generasi

digital native, memiliki pemahaman dan keterampilan etika profesi yang kuat menjadi krusial untuk meningkatkan literasi kewargaan siswa.

2. Tahapan Kedua: Desain Produk

Produk yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah modul ajar modul ajar etika profesi guru PPKn dalam *digital native teacher* terhadap peningkatan keterampilan literasi kewargaan siswa. Modul ajar dirancang untuk pembelajaran mandiri (*self-instructional*) untuk guru, terutama *digital native teacher* dengan pertimbangan fleksibilitas waktu dalam belajar. Mereka bisa mengakses modul kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini memungkinkan proses peningkatan kompetensi yang berkelanjutan tanpa harus terikat jadwal pelatihan formal yang kaku. Selanjutnya modul ajar memiliki struktur yang jelas dan fokus pada materi yang dijabarkan terhadap kompetensi tertentu. Keteraturan ini memastikan bahwa materi disajikan secara logis, dari konsep dasar hingga aplikasi praktis, sehingga memudahkan calon guru PPKn untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika tersebut sebagai user pada konteks *Digital native teacher*.

Modul ajar ini dikembangkan dalam format digital (e-modul) dapat diintegrasikan dengan berbagai fitur multimedia seperti video, simulasi, kuis interaktif, dan forum diskusi daring. Ini sesuai dengan gaya belajar *digital native* yang lebih visual, interaktif, dan terkoneksi, membuat proses belajar etika menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.

Tabel 4.1 Kisi-Kisi Modul Ajar

Materi	Butir
Hakikat dan Pilar Etika Profesi Guru PPKn	a. Landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis profesi keguruan. b. Peran sentral guru PPKn dalam membentuk karakter bangsa. c. Kode etik guru Indonesia dan nilai-nilai etis Pancasila dalam profesi guru
Transformasi Peran Guru PPKn dalam Era Digital	a. Dari pengajar ke fasilitator dan mediator.

	b. Perubahan gaya komunikasi antara guru dan siswa digital native. c. Tantangan membumikan nilai Pancasila di tengah arus informasi global
Etika dalam Praktik Keguruan PPKn	a. Perilaku etis guru di ruang digital (media sosial, platform pembelajaran, dll.). b. Batasan dan tanggung jawab guru dalam penggunaan teknologi (plagiarisme, privasi, cyberbullying). c. Literasi digital sebagai bagian dari kompetensi etis guru.
Integrasi Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Etika Profesi	a. Pancasila sebagai pedoman moral dalam dunia pendidikan digital. b. Etika warga negara digital: membangun keteladanan dalam dunia maya. c. Penguatan civic disposition guru sebagai panutan masyarakat.
Kode Etik Baru untuk Guru PPKn di Era Digital	a. Apakah diperlukan revisi kode etik guru saat ini? b. Rekomendasi penyusunan pedoman etika guru berbasis digital. c. Partisipasi aktif organisasi profesi dalam menyusun etika baru.

3. Tahap Tiga: Review dan Uji Coba Produk

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini. Tahap ini terdiri dari evaluasi dari validator, yaitu ahli media dan materi pembelajaran, dan mahasiswa.

a. Evaluasi Ahli Konten Materi PKN

Ahli materi pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah ahli konten materi PKN, Keempat ahli ini mampu menilai produk yang dihasilkan dan penguatan materi-materi didalam PKN berbasis kearifan lokal. Validasi ini dilakukan pada Juni 2022. Uji produk kepada ahli materi dan pengembangan ini melalui angket.

Angket tersebut terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu desain teks atau tifografi, literatur pendukung, isi (materi/koten) dan pengguna. Hasil validasi ahli media dan konten PKn disajikan dalam tabe 4.2

Tabel 4.2 Hasil validasi ahli media dan konten PKn

No	Komponen	Indikator	Skor	Kategori
1	Teks (Bahasa)	Ketepatan pemilihan font dan ukuran huruf agar mudah dibaca	5	Sangat baik
		Ketepatan warna teks agar mudah dibaca	5	Sangat baik
		Kesesuain bahasa dengan EYD	4	Baik
		Komunikatif	5	Sangat baik
		Kalimat efektif	5	Sangat Baik
Jumlah skor komponen teks atau tifografi (Bahasa)			24	
Rata-rata			4,8	Baik
2	Isi	Materi, tabel dan gambar terlihat jelas	4	
		Materi, tabel dan gambar yang mudah dipahami	5	Sangat baik
		Materi mengandung unsur subtansi kearifan lokal	4	Baik
		Materi rigid dalam pembahasan nilai-nilai karakter	5	Sangat baik
		Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran mata	5	Sangat baik

		kuliah		
		Materi disajikan dengan jelas dan runtun	5	Sangat baik
		Keakuratan mater	5	Sangat Baik
		Kemuktahiran materi	4	Baik
		Kedalaman materi	5	Sangat baik
		Keluasan materi	5	Sangat Baik
		Ketepatan pemilihan contoh kasus dengan materi	5	Sangat baik
		Ketepatan pemilihan literatur pendukung dengan materi	5	Sangat baik
		Materi mendorong rasa ingin tahu	5	Sangat baik
		Kesesuaian materi dengan karakter Mahasiswa	4	Baik
	Jumlahs skor komponen isi		66	
	Rata-rata		4,7	Baik
3	Literatur pendukung	Kemudahan mengakses literatur pendukung	5	Sangat Baik
		Kompoisi literatur pendukung	4	Baik
Jumlahs kor komponen navigasi			9	
Rata-rata			4,5	
4	Pengguna	Media yang sesuai dengan karakteristij pengguna	5	Sangat Baik

	Fleksibilitas	4	Baik
Jumlahs kor komponen pengguna		9	
Rata-rata		4,5	Baik

Berdasarkan table 4.2 konten modul ajar digital native teacer yang dikembangkan oleh peneliti memperoleh skor rata-rata 4.6 yaitu 4.8 untuk komponen teks, 4.7 untuk komponen isi, 4.5 untuk komponen literatur pendukung dan 4.5 untuk komponen pengguna. Total rata-rata skor untuk seluruh komponen mencapai 4,6 atau masuk dalam kategor “Baik”. Dengan demikian, Modul ajar masih layak diuji coba tanpa harus melakukan revisi. Kalau dikreteria penilaian dalam persentase maka nilai yang dicapai mendapat 86 % atau kesimpulan valid.

b. Evaluasi Ahli Konten Materi PPKn

Untuk menilai kelayakan materi yang terkandung dalam modul ajar digital native teacher terhadap keterampilan literasi kewarganegaraan siswa maka dilakukan validasi kepada ahli materi. Ahli materi yang menjadi validator pada penelitian ini adalah 4 ahli konten materi PKn selaku ahli dalam konten materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan yang mengevaluasi beberapa komponen, yaitu desain teks atau tifografi, literatur pendukung, isi (materi/koten) dan pengguna. Validasi dilakukan pada juni 2025 dengan menggunakan angket uji kelayakan ahli materi. Angket tersebut terdiri dari dua komponen penilaian, yaitu komponen konten materi PKn. Hasil validasi ahli materi disajikan dalam tabel 4.3.

Berikut tabel hasil validasi terhadap kedua ahli baik media maupun materi dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 4.3 Uji Validas ke Ahli

Validator	Ahli Konten Materi	Validasi	Kriteria
Ahli Materi dan Bahasa	1	85%	Valid/Tidak Revisi
Ahli Materi dan	2	86%	Valid/Tidak Revisi

Bahasa			
Ahli Materi dan Bahasa	3	86%	Valid/Tidak Revisi
Ahli Materi dan Bahasa	4	86%	Valid/Tidak Revisi
Rata-rata		86%	Valid/Tidak Revisi

c. Evaluasi Ahli Konten Materi PKn

Evaluasi ini dilakukan dengan menguji coba pada 5 mahasiswa dari 29 mahasiswa semester 4 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kelima mahasiswa/i dipilih secara acak berdasarkan kemampuannya dalam pembelajaran baik berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Kelima mahasiswa diminta untuk menilai modul ajar *digital native teacher* Angket berisi tiga aspek penilaian, yaitu penyajian materi, pembelajaran dan bahasa. Data yang diperoleh dari uji coba tahap ini tersaji dalam tabel 4.4

Tabel 4.4 Hasil Uji Pengguna

No	Aspek	No Butir	Indikator	Rata-Rata Skor	Kategori
1	Materi	1	Materi dalam buku ajar mudah dipahami	4.5	Baik
		2	Materi yang disajikan dengan jelas dan runtun	4	Baik
		3	Materi yang disajikan bermanfaat dalam perkuliahan	5	Sangat Baik
		4	Materi dibahas secara mendalam	5	Sangat Baik
		5	Sumber atau literturnya	5	Sangat

			jelas dan mudah diakses		Baik
Rata-rata skor aspek materi				4,7	Sangat Baik
2	Pembelajaran	6	Mendorong rasa ingin tahu	5	Sangat Baik
		7	Meningkatkan minat belajar	4.5	Baik
Rata-Rata skor aspek pembelajaran				4.8	
3	Bahasa	8	Komunikatif	5	Sangat Baik
		9	Kesesuain Bahasa dengan EYD	4.5	Baik
Rata-Rata skor aspek Bahasa				4.8	
Rata-Rata Skor				4,7	Sangat Baik

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa skor rata-rata untuk aspek media dari hasil penilaian lima orang mahasiswa mencapai 4,7 dengan kategori “Sangat Baik”, skor rata-rata untuk aspek materi 4,7 dengan kategori “Sangat Baik” dan skor rata-rata untuk aspek pembelajaran 4,8 dengan kategori “Sangat Baik”, dan aspek bahasa mendapatkan skor rata-rata 4,7 dengan kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil ini peneliti tidak menemukan kekurangan mendasar dari produk yang perlu diperbaiki, baik dari segi materi, pembelajaran maupun Bahasa modul ajar *digital native teacher* sangat baik bila dipersentasikan 95 %. Adapun hasil dari evaluasi penggunaan buku ini adalah:

Tabel 4.5 Uji Valiasi kepada mahasiswa

Validator	Skor	Kriteria
Mahasiswa 1	96 %	Sangat Baik
Mahasiswa 2	93%	Sangat Baik

Mahasiswa 3	95%	Sangat Baik
Mahasiswa 4	95%	Sangat Baik
Mahasiswa 5	94%	Sangat Baik
Jumlah	473	
Rata-Rata	94%	Sangat Baik

Berdasarkan data tersebut, bahwa rata-rata mahasiswa menjawab dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian modul ajar *digital native teacher* sangat layak untuk dijadikan sebagai pegangan bagi mahasiswa khususnya di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada mata kuliah etika profesi guru.

4. Tahap Empat: Uji Keefektifan Produk.

Dalam melaksanakan uji keefektifan produk modul ajar maka dilakukan pengukuran pemahaman awal mahasiswa tentang *digital native teacher*. Maka dilakukan pre test melalui google form sebagai alat ukur awal untuk melakukan *treatment* dengan hasil data statistik sebagai berikut;

Gambar 4.1 Hasil PreTest



Pretest kepada seluruh kelas yang sedang mengambil mata kuliah etika profesi

guru, keseluruhan kelas yang dilakukan uji coba berjumlah lima kelas yaitu kelas A,B,C,D dan E. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah etika profesi guru, sehingga nantinya kelas yang memiliki hasil belajar yang rendah maka akan diberikan perlakuan oleh guru PPKn sesuai dengan modul ajar yang akan didesain sesuai kebutuhan mahasiswa melihat hasil pre-tes. Hasil pretest menunjukkan bahwa kelas C dengan jumlah mahasiswa 25 mahasiswa yang mengambil mata kuliah etika profesi pendidikan memiliki rata-rata nilai terendah dengan nilai 78,69.

Setelah mendapatkan hasil pretest mahasiswa maka, peneliti memberikan perlakuan kepada mahasiswa PPKn sebagai target uji keefektifan produk modul ajar. Treatment atau perlakuan dilakukan oleh guru PPKn sebagai talent pada penelitian ini, guru PPKn dalam memberikan perlakuan sesuai dengan modul ajar *digital native teacher* yang telah di desain dengan melihat kebutuhan calon guru PPKn sebagai *digital native teacher* untuk membentuk literasi kewargaan siswa.

Gambar 4.2 Treatment Uji Keefektifan Produk Modul Ajar



Setelah pelaksanaan treatment, peneliti memberikan tautan post-test kepada 25 mahasiswa yang sebelumnya telah mengisi pre-test dan memperoleh perlakuan, dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dihasilkan.

Gambar 4.3 Mahasiswa mengisi post test



Setelah seluruh mahasiswa menyelesaikan pengisian post-test, hasil dari tautan yang telah diisi disajikan pada bagian berikut.

Gambar 4.4 Hasil Post Test



Setelah melakukan treatment menggunakan modul ajar sebagai pelatihan etika profesi guru PPKn Dalam *Digital Native Teacher* kepada calon guru PPKn tentunya

menunjukkan perubahan pada mahasiswa. Hal ini didukung pada hasil post test yang jika di rata-ratakan mahasiswa yang mendapat hasil 85,84 nilai ini dikategorikan baik, hal ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dari angka 78,69. Hal ini menunjukkan bahwa treatment dengan menggunakan modul ajar yang dilakukan dengan menggunakan modul ajar dalam digital *native teacher* berhasil dilakukan.

Mahasiswa sebagai calon guru PPKn mampu menguraikan bagaimana peran guru profesi guru PPKn menempatkan diri pada perkembangan globalisasi yang harus mampu memiliki keterampilan digitalisasi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif melihat bagaimana digitalisasi yang memberikan dampak positif dan negatif kepada siswa, dimana dengan adanya perkembangan globalisasi siswa menjadi individual dan tidak memiliki motivasi belajar, jadi dengan guru mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan mampu berkreasi dengan mengembangkan pembelajaran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran *online*, video, dan media pembelajaran lainnya. Sehingga tujuan pembelajaran PPKn dapat tercapai dan mampu membantu siswa yang memiliki kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan komunikasi sebagai tuntutan kemampuan siswa di abad 21.

Selain memiliki kemampuan digitalisasi, mahasiswa memahami bahwa kemampuan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan kode etik seorang guru yang mana guru PPKn perlu menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, serta memperhatikan privasi dan keamanan siswa tanpa melanggar kode etik sebagai seorang guru yang profesional. Karena ini sangat berkaitan dengan etika profesi yaitu dimana guru harus menjadi contoh dan teladan bagi siswa, dan bertanggung jawab dalam menggunakan alat teknologi yang digunakan agar tidak terjadi penyalahgunaan digital yang berdampak negatif untuk siswanya. Maka seorang guru PPKn harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sambil mempertahankan nilai-nilai etika profesi yang tinggi.

Kemudian mahasiswa menyadari bahwa keterampilan digitalisasi dan keterampilan-keterampilan lainnya menjadi seorang guru profesional tentunya tidak bisa didapatkan sepenuhnya dari perkuliahan, setelah menyelesaikan perkuliahan dan

akan berkarir menjadi guru PPKn yang professional guru harus mampu mengikuti perkembangan pembelajaran PPKn baik mencakup pada kurikulum, pengembangan Media, model dan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran PPKn. Keterlibatan mengikuti organisasi-organisasi guru yang ada di Indonesia merupakan salah satu langkah untuk membentuk keterampilan digitalisasi dan keterampilan-keterampilan lainnya menjadi seorang guru professional, organisasi-organisasi keguruan yang ada di Indonesia bisa memfasilitasi guru-guru yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta kegiatan-kegiatan keguruan yang mampu mengembangkan professional guru.

B. Pembahasan

Analisis kebutuhan calon guru ppkn sebagai *digital native teacher*, penelitian ini secara tepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak calon guru PPKn sebagai *digital native teacher* akan modul ajar etika profesi yang relevan dengan era digital. *Digital native teacher* bukan hanya individu yang lahir di era digital, melainkan juga guru yang secara intuitif mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar-mengajar sehingga guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam meningkatkan kinerja, oleh karena itu guru perlu memahami dan menerapkan literasi digital agar siswa terdorong untuk berpartisipasi aktif dan inovatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan (Ahyani et al., 2024).

Literasi kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menghadapi era masyarakat 5.0, dengan kemampuannya sangat membantu siswa berpartisipasi dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Widiatmaka & Kurniawan, 2023). Sehingga guru dalam kebutuhan mengajar dan mendidik bukan hanya pada pemahaman teknis, melainkan juga pada keterampilan pedagogis dan etis dalam menggunakan teknologi. Peneliti mencoba menguraikan kesiapan matang sosok guru di era digital sebagai *digital native teacher* melalui modul ajar dengan menjawab kebutuhan tersebut yang menjabarkan materi tentang perilaku etis di ruang digital, batasan penggunaan teknologi, dan etika dalam interaksi daring dengan para murid. Guru perlu penguatan tentang kompetensi digital dalam hal implikasi etika dan perilaku sosial sebagai user (sipengguna teknologi).

Proyeksi literasi kewargaan siswa berdasarkan nilai pancasila di era digitalisasi melalui pengembangan modul ajar ini secara langsung memproyeksikan peningkatan literasi kewargaan siswa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Literasi kewargaan di era digital tidak hanya mencakup kemampuan mengakses dan mengolah informasi, tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab sebagai warga negara dalam ruang digital. Kemajuan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap pendidikan, menciptakan kebutuhan kritis akan pengembangan profesional guru (TPD) yang mengintegrasikan teknologi dengan pedagogi (Napitupulu et al., 2025).

Modul ajar yang melatih guru PPKn untuk memahami etika digital dan integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran akan memungkinkan mereka untuk membimbing siswa dalam menanggapi tantangan seperti berita palsu (*hoax*), perundungan siber (*cyberbullying*), dan radikalisme digital. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa guru yang memiliki literasi etika digital yang kuat akan menjadi teladan (*role model*) bagi siswanya. Mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam program literasi digital, menciptakan komunitas online positif yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, serta memberdayakan individu dan organisasi yang memperjuangkan nilai - nilai tersebut, era digital menjadi platform untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, bukan ancaman bagi mereka. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila adalah prinsip-prinsip hidup ataupun pedoman hidup yang memandu tindakan dan interaksi kita di era digital. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis, baik offline maupun online (Sukadi, 2023). Modul ajar ini tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang kokoh di tengah arus globalisasi.

Hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan signifikan pada nilai post-test mahasiswa menunjukkan efektivitas modul ajar ini. Kenaikan rata-rata dari 78.69 menjadi 85.84 membuktikan bahwa modul ajar berhasil dalam meningkatkan pemahaman calon guru PPKn tentang etika profesi di era digital. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung mengukur peningkatan literasi kewargaan pada siswa, peningkatan kompetensi guru secara logis akan berdampak pada kualitas pengajaran mereka. Guru yang lebih memahami etika digital akan lebih siap untuk mengintegrasikannya ke dalam materi PPKn, seperti membahas dampak positif dan

negatif dari perkembangan teknologi.

Peningkatan ini juga didukung oleh temuan bahwa modul ajar tersebut sangat dihargai oleh mahasiswa, dengan skor rata-rata 4.7 yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik." Ini mengindikasikan bahwa desain modul ajar yang interaktif dan relevan sangat efektif dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Efektivitas ini dapat diperkuat oleh pendekatan *SCL student centered learning* yang memungkinkan guru untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi kewargaan, ntuk meningkatkan mutu pembelajaran, dibutuhkan guru yang berkualitas.

Seorang guru harus memiliki keterampilan dasar sebagai profesionalisasi tugasnya. Ada sepuluh kemampuan dasar profesional guru, yaitu: 1) Menguasai Materi, 2) Mengelola Program Belajar Mengajar, 3) Mengelola Kelas, 4) Menggunakan sumber media, 5) Menguasai Landasan Pendidikan, 6) Mengelola Interaksi Belajar Mengajar, 7) Menilai prestasi Siswa untuk tujuan pengajaran, 8) Mengenali Fungsi dan Program Layanan Bimbingan dan Konseling, 9) Mengenali dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan 10) Memahami prinsip dan menginterpretasikan hasil penelitian pendidikan untuk tujuan pengajaran. Metode pembelajaran diperlukan untuk mengetahui pola dan konsep prinsip dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada kegiatan belajar mengajar bagi siswa (Handayani & Syah, 2023).

Modul ajar ini secara efektif berfungsi sebagai jembatan yang krusial, menghubungkan teori etika profesi *digital native teacher* yang seringkali abstrak dengan praktik nyata yang relevan bagi calon guru PPKn. Dengan menyediakan materi yang kontekstual dan interaktif, modul ini memungkinkan mereka tidak hanya memahami konsep-konsep seperti kode etik guru, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam konteks digital sehari-hari, mulai dari penggunaan media sosial hingga pengelolaan kelas daring. Pada akhirnya, internalisasi ini diproyeksikan untuk berdampak langsung pada literasi kewargaan siswa, di mana guru yang beretika digital akan menjadi panutan dalam membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, bijaksana, dan Pancasilais di tengah tantangan era digitalisasi.

C. Luaran Yang Dicapai

Luaran wajib:

- a. Laporan Akhir.
- b. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi Scopus min Q4 /WoS.
- c. Hak Cipta Laporan.
- d. KI produk penelitian (hak cipta atau paten)

D. Rencana Selanjutnya

Setelah selesai dalam melakukan penelitian ini, maka rencana kegiatan berikutnya akan dilakukan kegiatan internal dan eksternal sebagai berikut;

Tindakan Internal: Implementasi dan Pembudayaan Nilai

1. Tindakan selanjutnya di lingkungan internal universitas akan berfokus pada penerapan langsung hasil penelitian ke dalam kurikulum dan budaya akademik.
2. Penerapan produk buku ajar dalam pembelajaran PPKn, produk buku ajar ini akan diterapkan pada mata kuliah etika profesi keguruan PKN. Implementasi ini tidak hanya terbatas pada satu kelas, tetapi akan menjadi bagian dari kurikulum standar untuk mahasiswa semester empat. Rencana ini akan mencakup pelatihan internal bagi dosen pengampu mata kuliah agar mereka dapat menggunakan modul ajar secara efektif, termasuk memanfaatkan fitur-fitur digital dan multimedia di dalamnya. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan standar kualitas dalam penyampaian materi, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal.
3. Membudayakan nilai-nilai karakter kebangsaan, penerapan buku ajar akan menjadi katalis untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter kebangsaan yang mencakup 18 karakter kewarganegaraan, keadilan, tanggung jawab, dan kehormatan. Rencana ini akan dilakukan secara sistemik melalui berbagai kegiatan. Sebagai contoh, di dalam kelas, dosen akan didorong untuk menggunakan studi kasus dari buku ajar yang mencerminkan tantangan etika digital, seperti isu tanggung jawab dalam berbagi informasi di media sosial atau keadilan dalam perlakuan terhadap siswa. Di luar kelas, nilai-nilai ini akan dipromosikan melalui kegiatan kemahasiswaan, seperti seminar, diskusi, dan

proyek sosial yang terintegrasi dengan moto UNIMED sebagai *The Character building University*.

Tindakan Eksternal: Diseminasi dan Penelitian Lanjutan

1. Tindakan eksternal akan berfokus pada penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan produk ke ranah yang lebih luas.
2. Penelitian lanjutan dan hibah dikti, Hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk mengajukan proposal penelitian hibah Dikti. Rencana penelitian lanjutan ini akan berfokus pada kajian lintas keilmuan, misalnya dengan menggabungkan kajian etika profesi dengan ilmu sosiologi pendidikan atau psikologi kognitif untuk menganalisis dampak modul ajar secara lebih mendalam. Fokus dapat juga bergeser pada skala yang lebih besar, melibatkan guru-guru PPKn di seluruh Indonesia untuk menguji efektivitas modul ajar dalam konteks praktik nyata.
3. Sosialisasi melalui asosiasi ap3kni, buku ajar dan desain pembelajaran yang dikembangkan akan disosialisasikan melalui Asosiasi Profesi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI). Rencana ini mencakup presentasi pada konferensi nasional AP3KnI, penyelenggaraan lokakarya, dan publikasi artikel di jurnal-jurnal ilmiah yang terafiliasi dengan asosiasi. Tujuannya adalah menjadikan buku ajar ini sebagai salah satu rujukan utama bagi pendidik PPKn di seluruh Indonesia, memastikan hasil penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian pengembangan ini berhasil menghasilkan dan memvalidasi modul ajar etika profesi guru ppkn untuk *digital native teacher* yang secara signifikan efektif dalam meningkatkan pemahaman calon guru. Modul ajar ini memenuhi kebutuhan mendesak akan materi pembelajaran yang relevan, interaktif, dan kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teori tetapi juga pada penerapan etika profesi dalam konteks digital. Dengan kenaikan nilai rata-rata post-test yang signifikan, penelitian ini membuktikan bahwa modul yang dirancang secara khusus untuk guru digital native mampu menjembatani kesenjangan antara etika profesi tradisional dengan tantangan dan peluang di era digital.

Modul ini memproyeksikan dampak positif pada literasi kewargaan siswa, karena guru yang memahami etika digital akan menjadi panutan yang efektif dalam membentuk karakter Pancasila yang bijaksana dan bertanggung jawab di ruang siber. Keberhasilan produk ini didukung oleh validasi ahli yang sangat baik dan penerimaan positif dari mahasiswa sebagai calon pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa produk memiliki kelayakan teoretis dan efektivitas praktis yang tinggi.

Selanjutnya, penelitian ini tidak berhenti pada pengembangan produk. Langkah-langkah strategis telah dirancang untuk diseminasi dan keberlanjutan dampak, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, modul ajar ini akan diintegrasikan ke dalam kurikulum jurusan PPKn FIS UNIMED dan menjadi bagian dari budaya kampus untuk membudayakan nilai-nilai karakter kebangsaan. Secara eksternal, produk ini akan disosialisasikan melalui asosiasi profesi seperti AP3KnI dan dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan guna memberikan kontribusi yang lebih luas bagi dunia pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan produk yang valid dan efektif, tetapi juga meletakkan fondasi yang kuat untuk

pengembangan profesionalisme guru PPKn di masa depan

B. Saran

Diharapkan luaran dari penelitian ini, yakni buku ajar etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher, dapat menjadi rujukan utama dalam pengembangan kurikulum di Jurusan PPKn FIS UNIMED dan seluruh jurusan PPKn se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI). Saran ini didasarkan pada temuan bahwa: Buku ajar ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi etika digital mahasiswa, yang merupakan elemen penting dari kecerdasan moral di era modern. Buku ajar ini membantu menginternalisasi 18 nilai karakter kebangsaan seperti tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian dalam konteks digital, yang sangat relevan bagi calon guru PPKn. Penerapan buku ajar ini secara sistematis akan mendukung upaya UNIMED sebagai *The Character Building University* dengan memperkuat calon guru dengan pondasi pemahaman etika profesi keguruan Pkn. Dengan menjadikan buku ajar ini sebagai acuan, diharapkan dapat terwujud penguatan karakter kebangsaan yang adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, N., Fitria, H., Lian, B., & Nugroho, H. S. (2024). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kinerja Guru. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 11(3), 1296–1308.
- Baskara, A., & Sutarni, N. (2024). Kompetensi pedagogik guru SMA di Indonesia: Sebuah systematic literature review. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3481–3496.
- Creswell, J. (2015). Riset pendidikan: Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Effendi, H., & Hendriyani, Y. (2018). *Pengembangan Model Blended Learning Interaktif dengan Prosedur Borg and Gall*.
- Handayani, W., & Syah, S. H. (2023). Penerapan Student Centered Learning Dan Projek Penguatan Profil Pancasila Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ditinjau Dari Perspektif Study Literatur. *Prosiding Business Adaptability, Change Management and Technopreneur Conferences*, 1(2), 558–570.
- Indriawati, P., Yulianto, M., & Simamora, E. M. (2023). Kode Etik Profesi Guru. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 103–114.
- Jamaludin, J. (2020). Membangun Nalar Pengetahuan Warga Negara Melalui Buku Digital Dikalangan Mahasiswa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 769–776. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.296>
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., Pinem, W., Syafrizal, S., & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Komariah, A. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Kurniawan, M. W. (2018). PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA DEMOKRATIS. *Laboratorium PPKn FKIP UNS*.
- Maghfiroh, S., & Eliza, D. (2021). Mengenal standar dan etika profesionalisme guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 2707–2711.
- Manik, W., Siregar, K. N., Salsabila, Z., Maysarah, Y., Zahrah, A., & Nasution, S. A. (2024). Eksistensi Etika Profesi Keguruan Dalam Menghadapi Krisis Pendidikan Era Society 5.0. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(4), 212–220.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Napitupulu, M. H., Muddin, A., Diana, S., & Rosyidah, N. S. (2025). Teacher professional development in the digital age: Strategies for integrating technology

- and pedagogy. *International Journal for Science Review*, 2(4).
- Nofriyanti, Y., & Nurhafizah, N. (2019). Etika Profesi Guru Paud Profesional Dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermutu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(1), 676–684.
- Prayetno, P., Iqbal, M., Jamaludin, J., & Pinem, W. (2022). Layang Teacher Platform in the Cyber Pedagogy Room. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2(3), 580–587. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i3.390>
- Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. Guepedia.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- Sukadi. (2023). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa di Era Digital Sebagai Generasi Penerus Bangsa*. 7(2), 1570–1576.
- Sutiono, D. (2021). Profesionalisme Guru. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 16–25.
- Widiatmaka, P., & Kurniawan, I. D. (2023). Peningkatan Civic Literasi dengan Memanfaatkan Literasi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pekommas*, 8(1), 59–70.
- Yunita, S. (2022a). CITIZENSHIP LEARNING THROUGH SELF ORGANIZED LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS'LEARNING STYLES. *Devotion Journal of Community Service*, 3(11), 1054–1065.
- Yunita, S. (2022b). *INOVASI PEMBELAJARAN PKN MENYONGSONG PROFIL CALON GURU MASA DEPAN*. CV. Format Publishing.
- Yunita, S., & Tambunan, H. (2021). Reflector and Pragmatic Learning Styles in Learning Value Clarification Technique (VCT) and Direct Instruction (DI). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2329–2342.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontrak Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, Fax. (061) 6614002
Laman: ppkm.unimed.ac.id

KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PRODUK TERAPAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: 0092/UN33.8/PPKM/PPT/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 01994/UN33/KPT/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan Periode 2023-2027, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan 20221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Jamaludin, S.Pd., M.Pd. : Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti skema Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kontrak**

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Pengembangan Modul Ajar Etika Profesi Guru PPKn Dalam Digital Native Teacher Terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan Siswa".

Pasal 2 **Dana Penelitian**

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal PNRP Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025;

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 40.150.000,- (*Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pihak Pertama akan membayarkan dana penelitian kepada Pihak Kedua secara bertahap sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap I (70%) sebesar Rp. 28.105.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 12.045.000,- (*Dua Belas Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah Pihak Kedua mengunggah Laporan Kemajuan; Catatan Harian dan Progress Luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta telah menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan ke Kantor LPPM UNIMED.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Jamaledin, S.Pd., M.Pd.**
Nomor Rekening : **1669975298**
Nama Bank : **PT BNI (Persero) Tbk**

- (3) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan Pihak Kedua dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025;
- (2) Khusus terkait Luaran Wajib Penelitian berupa Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus minimal Q4/Web of Science dan Kekayaan Intelektual Produk Penelitian dapat diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5 **Luaran**

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yaitu:
- Laporan Akhir;
 - Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus minimal Q4/Web of Science;
 - KI Produk Penelitian (Hak Cipta Produk atau PATEN);
 - Hak Cipta Laporan;
- (2) Batas waktu pemenuhan luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c dapat dilakukan paling lambat sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2);
- (3) Jika luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c belum terpenuhi pada masa berakhir kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Peneliti wajib mengunggah progres capaian luaran wajib;
- (4) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditetapkan.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat 31 Juli 2025 sebanyak 1 (*satu*) eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%);
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal 31 Oktober 2025;
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Ditulis dengan format font Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1½
 - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dihayati oleh:
Dana PNPB Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan
Nomor: 0194/UN33/KPT/2025

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 04 s.d 15 Agustus 2025 terhadap Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- (2) Jika terdapat perubahan terhadap tanggal sebagaimana tercantum pada ayat (1), **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan perubahan jadwal kepada **Pihak Kedua** paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9
Perubahan Tim Peneliti

Perubahan terhadap susunan Tim Peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

Pasal 10
Penggantian Ketua Peneliti

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan mendapatkan status tugas belajar selama proses penelitian dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (2) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan meninggal dunia selama proses penelitian dilaksanakan, maka anggota tim **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 11
Sanksi

- (1) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi oleh **Pihak Kedua**, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi oleh **Pihak Kedua**, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya.

Pasal 12
Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan;
- (2) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian wajib melalui Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan pada laman <https://lppm.unimed.ac.id/kimhaki/> paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2025;
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,
Pdt. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Pihak Kedua,

Jamaludin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198802192019031011

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



Nomor : **01r** /UN33.8/LL/2025
Lamp. : --
Hal : Surat Izin Penelitian

Medan, 10 Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
di
Tempat

Dengan hormat, kami mohon bantuan saudara untuk memberi izin kegiatan penelitian tahun 2025 yang dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1.	Jamaludin, S.Pd., MPd	198802192019031011	Ketua
2.	Dr. Sri Yunita, S.Pd., MPd.	197006082006042002	Anggota
3.	Oksari A. Silalahi, MPd	199410152022032020	Anggota
4.	Syuratty Astuti Rahayu Manalu, S.Pd., S.H.MH.	198304252024212015	Anggota
5.	Budi Ali Mukmin, S.I.P, M.A.	198204172010121001	Anggota
6.	Fahrysyah Aulya	3221111013	Mahasiswa
7.	Bertania Permata Sari	3223311014	Mahasiswa
8.	Adelina Sitanggang	3223111057	Mahasiswa
9.	Dyna M T Pasaribu	3223311010	Mahasiswa
10.	Mira Cahya	3222411005	Mahasiswa

Judul Penelitian : Pengembangan Modul Ajar Etika Profesi Guru Ppkn Dalam Digital Native Teacher Terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargan Siswa

Lokasi Penelitian : Jurusan PPKn FIS-UNIMED

Waktu Penelitian : 11 Juni s.d 31 Oktober 2025

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1266 /UN33.8/LL/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dengan ini menugaskan,

No.	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1.	Jamaludin, S.Pd., M.Pd	198802192019031011	Ketua
2.	Dr. Sri Yunita, S.Pd., M.Pd.	197006082006042002	Anggota
3.	Oksari A. Sihalohe, M.Pd	199410152022032020	Anggota
4.	Syuratty Astuti Rahayu Manalu, S.Pd., S.H.,MH.	198304252024212015	Anggota
5.	Budi Ali Mukmin, S.I.P, M.A.	198204172010121001	Anggota
6.	Fahrysyah Aulya	3221111013	Mahasiswa
7.	Bertania Permata Sari	3223311014	Mahasiswa
8.	Adelina Sitanggang	3223111057	Mahasiswa
9.	Dyna M T Pasaribu	3223311010	Mahasiswa
10.	Mira Cahya	3222411005	Mahasiswa

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Produk Terapan tahun 2025 dengan judul "Pengembangan Modul Ajar Etika Profesi Guru Ppkn Dalam Digital Native Teacher Terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan Siswa", yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2025 di Jurusan PPKn FIS-UNIMED.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Medan, 10 Juni 2025

Ketua,



Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Lampiran 4. Luaran Penelitian

1. Lembar Penerimaan Naskah Buku Modul Ajar (Proses ISBN Ke Perpunas)



**LEMBAR PENERIMAAN NASKAH
(LETTER OF ACCEPTANCE)**
Nomor: 109/SPM/VII/C/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmahwan Syahputra, S.I.P., M.A.
Jabatan : Direktur CV Sangpena Media
Alamat : Jl. Masyawarah, Pasar 1, Biau-Biau, Deli Serdang, Sumatera Utara
Email : sangpenamedia@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa naskah yang ditulis oleh:

Nama Penulis : **Jamaluddin, Sri Yunita, Okuuri A. Silalahi, Syuratty Asmi Rahayu Manala,
Bedi Ali Makmin, Nurainun, Apeianta Tarigan, Tri Giti Laurensia
Shabelon**

Judul Naskah : **Etika Profesi Keguruan PKn di Era Digital Native Teacher**

Telah diterima oleh CV Sangpena Media untuk diproses dalam tahap penerbitan ISBN sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di penerbit kami.

Penerimaan naskah ini merupakan bentuk persetujuan awal dari penerbit untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu editing, layout, desain sampul, dan penerbitan. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak penerbit dan penulis.

Demikian **Letter of Acceptance** ini dibuat sebagai bukti penerimaan naskah untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Deli Serdang, 17 Oktober 2025

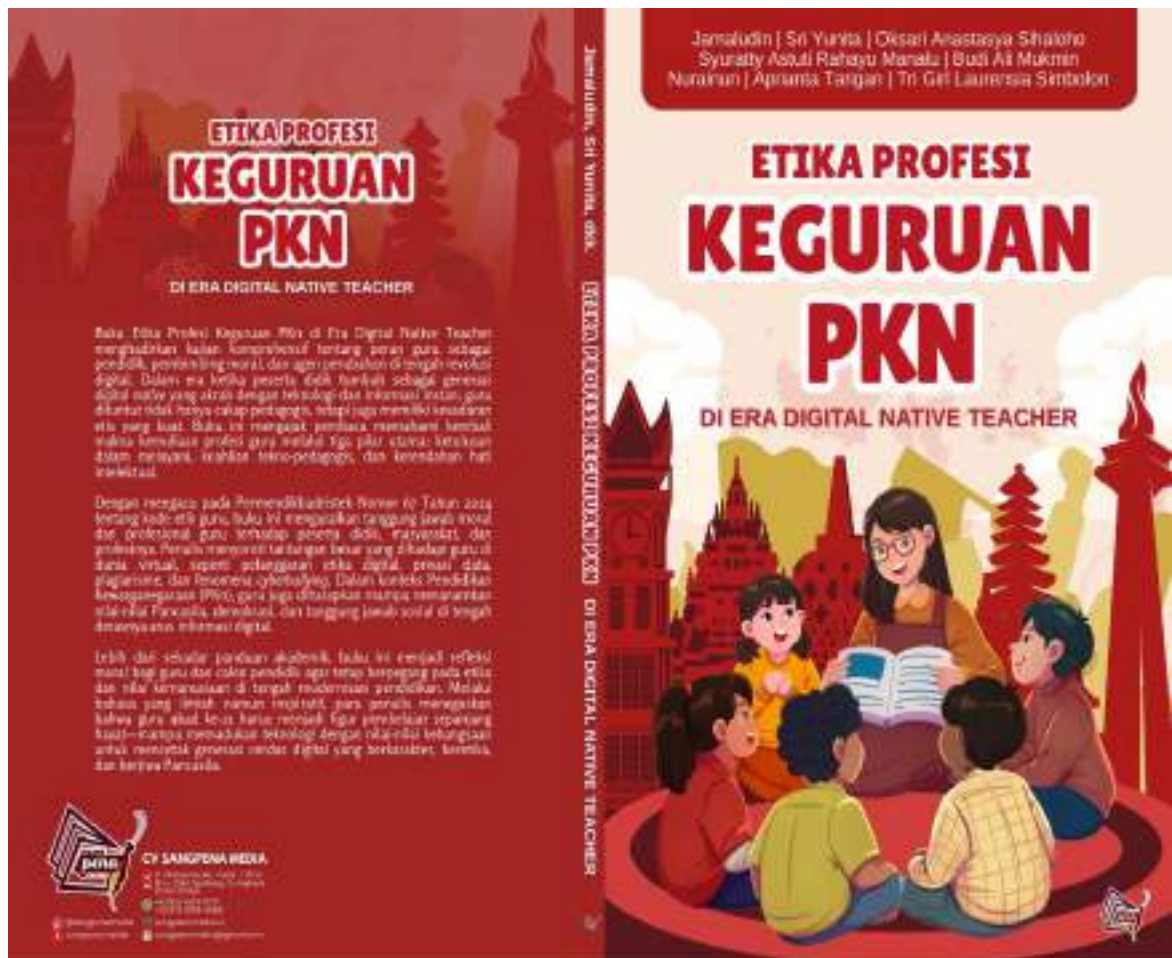
Hormat kami,

CV Sangpena Media



[Signature]
Hikmahwan Syahputra, S.I.P., M.A.
Direktur CV Sangpena Media

2. Cover Modul Ajar (Proses ISBN Ke Perpunas)



3. Prosiding internasional icssis 7th 2025



4. Artikel prosiding internasional

Strengthening the Professional Ethics Competence of Civics Education Teachers as Digital Native Teachers through the Development of Innovative Teaching Modules

Jannatulita¹(0009-0001-2943-8281), Sri Yurita¹(0009-0001-9350-1363), Oksari Notaryn Sihaleha¹(0009-0001-9444-4907), Syarifaty Azzati Rahayu Marula¹(0009-0001-9013-9987), Budi Ali Mukminin¹(0009-0001-1780-8411)

¹ Department of Pancasila and Civics Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Medan, Indonesia

jannatulita@unimed.ac.id

Abstract. This research is motivated by the challenges in the professional ethics of Civics teachers, highlighted by over 1,200 cases of ethical violations reported in the 2022 National Education Performance Evaluation. The majority of these cases are caused by a lack of understanding of the professional code of ethics. The rapid advancement of digital technology has not only transformed the learning environment but also posed ethical challenges in educational practice. Civics Education teachers, as role models of civic values, are required to integrate professional ethics into the teaching process while utilizing digital-based learning tools. Civics teachers play a strategic role in shaping student character based on Pancasila values. However, existing teaching modules are often generic and irrelevant to the needs of teachers in the digital era. The objective of this research is to develop a Pancasila-based professional ethics teaching module for pre-service Civics teachers, who are considered digital natives, in order to enhance students' cultural and civic literacy. This study employs a Research and Development (R&D) approach using the Borg & Gall model, which includes needs analysis, design, validation, trials, revision, and implementation. Data were collected through interviews, questionnaires, and documentation, and subsequently analyzed using both qualitative and quantitative methods. This paper is expected to enrich the literature on the development of Pancasila-based professional ethics teaching modules and to enhance the competence of the new generation of digital native teachers.

Keywords: Professional Ethics; Civic Literacy; Digital Native Teacher.

1. INTRODUCTION

Civics and Pancasila Education teachers have a strategic role in shaping the nation's character through the internalization of Pancasila values. However, the phenomenon of professional ethics violations involving teachers presents a challenge to maintaining the image of the teaching profession. Based on the 2022 National Education Performance Evaluation Report, there were more than 1,200 recorded cases

of professional ethics violations among teachers. These violations include indiscipline, abuse of authority, and a lack of professionalism in carrying out their duties as educators. Furthermore, a report from the National Education Ombudsman Institution 2023 indicates that 65% of ethical violations by teachers are caused by a lack of understanding of the professional code of ethics. These violations among teachers encompass unprofessionalism, conflicts of interest, and behavior inconsistent with the code of ethics.

The urgency of this research lies in the pressing need to strengthen professional ethical competence among Civics teachers. In the context of national education, teachers are not only required to master subject matter but also to be role models in ethical attitudes and behavior. The professional code of ethics for teachers serves as both a guideline and a moral foundation for a teacher to behave professionally. [4]. As educators tasked with teaching the values of Civics and Pancasila teachers hold the dual responsibility of internalizing ethics in their students.

In an era of open access to information and communication, a teacher is called upon to be a guide on the students' journey to explore and understand the world around them, including its cultural diversity and the values of citizenship. [13]. A teacher who possesses strong cultural and civic literacy is like a skilled tour guide. Such a guide not only introduces various interesting places but also explains the meaning and history behind each one. Similarly, in the learning process, a teacher who understands culture and civics connects lessons to real and meaningful life. By doing so, they can provide concrete examples from daily life that relate to the subject matter, such as local culture and values.

Being a Pancasila and Civics teacher carries the responsibility of shaping student character. Strengthening cultural and civic literacy can encourage students to develop attitudes of mutual respect, tolerance, and going beyond communal cooperation. These values are essential for shaping students' character, helping them become good and responsible individuals. [6].

In the era of globalization, Pancasila and Civics teachers face the challenge of preparing students as hypothetical citizens to become future leaders. Students need the ability to interact with people from diverse cultural, ethnic, and religious backgrounds; therefore, the capability to build civic reasoning is essential. [5]. Cultural and civic literacy serves as an effort to equip students' civic reasoning, making them better prepared to face future challenges as mature individuals who are ready to be effective, productive, and competitive.

In the last three years, research on teacher professional ethics has revealed several important findings.[12] High-quality learning can be achieved by enhancing the professional competence of teachers and implementing professional ethics. [9] The achievement of educational objectives is highly dependent on the quality of teachers, as they are professional educators whose primary duties are to educate, teach, guide, direct, train, assess, and evaluate students. [18] Teacher professionalism is a condition encompassing the direction, values, goals, and quality of expertise and authority in the field of teaching and related occupations. Meanwhile, a professional teacher is one who possesses the required competencies to perform educational and teaching tasks. These competencies include professional knowledge, attitudes, and skills, whether personal, social, or academic.

Professional ethics serves as a strategic effort to enhance the ethical awareness and competence of Pancasila and Civics teachers. However, the available teaching modules are often not relevant to the specific needs of Civics teachers in the digital era, particularly in the context of the digital native teacher. Civics students who are prospective digital native teachers are expected to become innovative and inspiring educators, capable of shaping a young generation—especially students—to have smart civic literacy and be prepared for the future.

Civics content has undergone significant development due to the influence of a rapidly changing era. [19]. As Pancasila and Civics students and prospective teachers in the digital era, you will face challenges and opportunities in combining the noble values of Pancasila with ever-evolving technology, a task that demands a high degree of creativity and adaptability. The primary challenges include: Designing engaging and relevant learning experiences. Overcoming the digital divide.

Maintaining the relevance of Civics material amidst the rapid flow of information, especially in relation to civic literacy. [21]. Opportunities for the digital native teacher include creating more interactive and personalized learning experiences, as well as accessing limitless learning resources through technology. By mastering various digital platforms and pedagogical skills, a Pancasila and Civics teacher can be innovative and inspire students to become good and intelligent citizens.

Citizenship education in the 4.0 era requires preparedness and proficiency from its users both lecturers and students. [19], on internet-based digital platforms. Therefore, this research aims to develop a teaching module that focuses on the practical and contextual needs of professional ethics for Pancasila and Civics teachers, in their role as digital native teachers, to enhance students' civic literacy.

The era of digitalization has caused significant changes, particularly in the field of education. These changes often have profound impacts on the educational world, which are not solely positive but also bring negative consequences. As a result, the demands for improving and updating educational strategies have become increasingly complex. Today, education is expected not only to equip learners with knowledge but also with essential skills and strong moral qualities. [20]. The researcher proposes the development of a professional ethics teaching module for Pancasila and Civics teachers, specifically for digital native teachers, due to its high urgency in the current educational landscape. The digital era has brought fundamental changes in how students learn and interact as citizens. Therefore, ensuring that Civics teachers, particularly those of the digital native generation, possess a strong understanding and skills in professional ethics is crucial for enhancing students' civic literacy.

Based on the aforementioned background, the research problem is formulated as follows: "What are the outcomes of developing a professional ethics teaching module for Pancasila and Civics teachers, in their role as digital native teachers, on the improvement of students' civic literacy skills?" A teaching module is proposed as a win-win solution because it is designed for self-instructional learning. This is highly suitable for teachers, especially digital native teachers, considering the need for flexibility in learning time. They can access the module anytime and anywhere, according to their own learning pace. This enables a continuous process of competency enhancement without being bound by rigid formal training schedules.

Furthermore, the teaching module has a clear and focused structure on specific competencies. This organized approach ensures that the material is presented logically,

from basic concepts to practical applications, making it easier for prospective Civics teachers as users in the context of Digital Native Teachers to understand and internalize these ethical values. This module, developed in a digital format e-module, can be integrated with various multimedia features such as videos, animations, interactive quizzes, and online discussion forums. This aligns with the learning style of digital natives—who are more visual, interactive, and connected—making the process of learning ethics more engaging and less monotonous.

This research differs from previous studies by focusing on developing a module specifically for Pancasila and Civics teachers as digital native teachers, integrating both technology and Pancasila values. Additionally, this study bridges the gap between students' cultural and civic literacy and the practical needs of teachers by developing a training module integrated with Pancasila values and designed for digital native teachers in the digital era. Key differentiating aspects include: An approach based on civic literacy as a foundation for learning to enhance students' competence in facing global challenges.

The use of technology-based methods in professional ethics training, allowing for more interactive and relevant learning. A focus on sustainability through integrated evaluation, making the module more applicable and enduring.

2. METHOD

This study seeks to analyze the content and mode of a professional ethics teaching module for Pancasila and Civics teachers, in their role as digital native teachers, and its effect on improving students' civic literacy skills. The optimization of a professional ethics course for Civics teachers, based on the digital native teacher concept, is carried out through Research and Development R&D.

This research uses the development model from Borg & Gall. The R&D model is a process used to develop and validate an educational product, which consists of: "...studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage." [3]. R&D is a combined or mixed-methods approach that integrates both qualitative and quantitative data methods to produce and test the effectiveness of the developed product. In its implementation, this R&D study follows the procedures developed [16].

This study was conducted using several data collection techniques: Questionnaires: These were used to determine the feasibility, effectiveness, and response to the teaching module. Tests: These were used to collect data through objective and standardized measurements related to the improvement in student learning outcomes. [14]. Third, in-depth interviews were conducted to explore data from experts for product feedback, and to gather responses from students and lecturers following the implementation of the course. [15]. Fourth, observation was used to monitor the implementation of the teaching module during lectures and other research activities. [2], [15]. Document Analysis: Fifth, this was used to examine curriculum policies, laws and regulations, and other relevant documents. Sixth, Literature Review This was conducted to produce a teaching module based not only on an empirical framework but also on a logical framework, supported by expert opinions in the form of authoritative knowledge. [7]

3. RESULT AND DISCUSSION

This research was conducted by following developmental stages aimed at producing a "Teaching Module on the Professional Ethics of Pancasila and Civics Teachers as Digital Native Teachers to Enhance Students' Civic Literacy Skills." The development process consists of four main steps: 1. conducting a preliminary study, 2. designing the teaching module, 3. evaluating and trialing the product, and 4. testing the effectiveness of the developed product.

1. First Stage: Preliminary Study

Preliminary data collection was conducted to obtain an initial overview of the needs and real-world conditions in the field before the development of the teaching module. This data aimed to identify the learning challenges related to the Professional Ethics of Civics Teachers in the digital era. Data was gathered from Civics lecturers and teachers regarding the needs of prospective Civics teachers amidst technological advancements, focusing on the 21st-century competencies required for students, in alignment with the professional ethics code for Civics teachers.

The pre-test results indicated a need for reinforcement for Civics students as prospective teachers. This reinforcement is related to the students' understanding and skills concerning the teacher's professional code of ethics, competencies as educators, positioning digital developments in learning, and developing soft skills in technology utilization as a digital native teacher to form students who possess civic literacy amidst contemporary challenges.

Therefore, the researcher is developing this professional ethics teaching module for Civics teachers, aimed at digital native teachers, due to its high urgency in the current educational landscape. The era of digitalization brings fundamental changes in the way students learn and interact as citizens. Consequently, ensuring that Civics teachers—especially those of the digital native generation—have a strong understanding and skills in professional ethics is crucial for enhancing students' civic literacy.

2. Second Stage: Product Design

This teaching module was developed in a digital format e-module and can be integrated with various multimedia features such as videos, simulations, interactive quizzes, and online discussion forums. This aligns with the learning style of digital natives, who are more visual, interactive, and connected, making the process of learning ethics more engaging and less monotonous.

3. Product Trial

The subject matter experts for the learning materials developed in this research were experts in Civics content. These four experts were qualified to assess the resulting product and the reinforcement of Civics materials based on local wisdom.

This validation was conducted in June 2022. The product was tested with subject matter and development experts via a questionnaire. The questionnaire consisted of several assessment components: text design or typography, supporting literature, content, and user aspects. The total average score for all components reached 4.6, which falls into the "Good" category. Thus, the teaching module was deemed feasible for trial.

without needing revision. If converted to percentage criteria, the score achieved was 86%, leading to a conclusion of "valid."

To assess the feasibility of the material contained in the digital native teacher module for enhancing students' civic literacy skills, a validation was conducted by subject matter experts. The validators in this study were 4 Civics content experts, who also serve as lecturers at the Faculty of Social Sciences, State University of Medan.

They evaluated several components: test design or typography, supporting literature, content, and user aspects. The validation was conducted in June 2025 using a feasibility assessment questionnaire for the experts. The questionnaire consisted of two assessment components, namely the Civics content component.

4. Product Effectiveness Test

To test the effectiveness of the teaching module, an initial measurement of the students' understanding of the Digital Native Teacher concept was conducted. A pre-test was administered to all five classes taking the teacher professional ethics course: classes A, B, C, D, and E. This pre-test was done to determine the students' learning outcomes in the course, so that the class with the lowest results would receive the treatment using the teaching module designed to meet their needs. The pre-test results showed that Class C, with 25 students, had the lowest average score of 78.69.

After implementing the treatment using the teaching module for professional ethics training, a noticeable change was observed in the students. This is supported by the post-test results, which showed an average score of 85.84. This score is categorized as "good" and demonstrates a very significant improvement from the initial 78.69. This indicates that the treatment using the teaching module for digital native teachers was successful.

4. CONCLUSION

Based on the results of the research and the discussion presented, it can be concluded that the development of the Pancasila and Civics Professional Ethics Teaching Module for Digital Native Teachers has successfully achieved its objectives effectively. This study was driven by the urgent need to equip prospective Civics teachers with professional ethics competencies relevant to the challenges of the digital era. Through the Borg & Gall research and development (R&D) model, a digital teaching module was successfully developed and validated with highly satisfactory outcomes. Expert validation results indicated that the module is feasible for use, achieving an average score of 86%, which falls into the "Valid/No Revision Required" category. Furthermore, trials conducted with students as end users yielded highly positive responses, with an average score of 94% or categorized as "Excellent," confirming that the content, presentation, and language of the module are easy to understand and highly relevant. The pinnacle of this product's success was demonstrated through the effectiveness test, which revealed a significant improvement in students' understanding. This was reflected in the increase of the post-test average score to 85.84, compared to the pre-test average score of 78.69. Thus, the module has been proven effective not only in enhancing cognitive knowledge but also in shaping prospective teachers' understanding of the importance of responsibly integrating digital

skills with the professional code of ethics. The product can serve as a practical solution and a vital reference for Civics education students in preparing themselves to become professional, innovative educators who are capable of enhancing students' civic literacy skills amid the challenges of globalization.

In addition, students realized that digital skills and other professional competencies cannot be fully acquired through coursework alone. Upon completing their studies and beginning their careers as professional Civics teachers, they must be able to keep pace with ongoing developments in Civics education—whether in curriculum design, media development, instructional models, or other aspects of teaching practice. Participation in professional teacher organizations in Indonesia is one strategic way to strengthen digital and professional competencies. Such organizations provide valuable opportunities for teachers by offering training programs and professional development activities that contribute significantly to advancing teachers' professional growth.

Acknowledgments. Praise and gratitude be to Almighty God for His blessings and grace, allowing the Progress Report of the Applied Research entitled “Strengthening the Professional Ethics Competence of Civics Education Teachers as Digital Native Teachers through the Development of Innovative Teaching Modules” to be completed on time. This applied research is part of the internal research program of Universitas Negeri Medan (UNIMED) in 2025, organized through the Institute for Research and Community Service (LPPM) UNIMED. On this occasion, we would like to express our sincere gratitude to all parties who have contributed and supported the completion of this final research report, namely: Rector of UNIMED, Chairperson of LPPM UNIMED, for her facilitation and coordination during the research implementation, Dean of the Faculty of Social Sciences (FIS) UNIMED, for her encouragement and support, all members of the research team who have worked diligently in completing this report, and be lecturers of the faculty courses and students who have cooperated and participated throughout the research process. We acknowledge that this report is still far from perfect. Therefore, constructive criticism and suggestions from esteemed readers are highly welcomed for the improvement and further development of future research. We hope this final research report will be beneficial, especially in the development of the Pancasila Education Learning model based on Artificial Intelligence.

Disclosure of Interests. The authors hereby declare that this research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. The study was fully funded and supported internally by Universitas Negeri Medan (UNIMED) through the Institute for Research and Community Service (LPPM) UNIMED. All authors have contributed significantly to the research and the preparation of this report, and none have received any personal benefits or payments that could have influenced the results or interpretations presented herein. Additionally, the authors affirm that this research complies with ethical standards and institutional guidelines. Any data or materials used in this study are accurately reported, and appropriate acknowledgments have been given to all contributors and supporting institutions.

REFERENCES

- [1] A. Haslams and N. Setiati, “Kompetensi pedagogik guru SMA di Indonesia: Sebuah systematic literature review,” *Dedaisiden: Jurnal Kependidikan*, vol. 15, no. 3, pp. 3481–3496, 2024.
- [2] J. Creswell, *Riset pendidikan: Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [3] H. Effendi and Y. Hendriyani, “Pengembangan Model Blended Learning Interaktif dengan Proedur Blog and Call,” 2018.

- [4] P. Indriawati, M. Yulianto, and E. M. Sinarso, "Kode Etik Profesi Guru," *Jurnal Syntax Purba*, vol. 3, no. 41, pp. 103–114, 2023.
- [5] J. Jamaliudin, "Membingkai Nalar Pergetahuan Warga Negara Melalui Buku Digital *Diklatangan Mahasiswa*," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences JEHSS*, vol. 3, no. 2, pp. 769–776, 2020, doi: 10.34007/jehs.v3i2.290.
- [6] J. Jamaliudin et al., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Yayasan Kita Menulis*, 2021.
- [7] A. Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, 2014.
- [8] M. W. Kusniawan, "Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam menggunakan warga negara demokrasi," *Laboratorium PPKn FKIP UNS*, 2018.
- [9] S. Mughliah and D. Elin, "Mengenal standar dan etika profesionalisme guru PAUD," *Jurnal Pendidikan Tambusani*, vol. 5, no. 2, pp. 2707–2711, 2021.
- [10] W. Marik, K. N. Siregar, Z. Salsabila, Y. Maysarah, A. Zohrah, and S. A. Nantius, "Eksistensi Etika Profesi Keguruan Dalam Menghadapi Krisis Pendidikan Era Society 5.0," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, vol. 3, no. 4, pp. 212–220, 2024.
- [11] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
- [12] Y. Nufiyanti and N. Nuhafizah, "Etika Profesi Guru PAUD Profesional Dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermutu," *Jurnal Pendidikan Tambusani*, vol. 3, no. 1, pp. 670–684, 2019.
- [13] P. Priyeta, M. Iqbal, J. Jamaliudin, and W. Pinem, "Laying Teacher Platform in the Cyber Pedagogy Room," *Edvest - Journal Of Universal Studies*, vol. 2, no. 3, pp. 580–587, 2022, doi: 10.36418/edv.v2i3.390.
- [14] P. H. Parwono, A. U. Ulya, N. Purnasari, and R. Jusiatsuko, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Ganesha, 2019.
- [15] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [16] P. Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [17] S. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [18] D. Sutono, "Profesionalisme Guru," *Tabligh Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 16–25, 2021.
- [19] S. Yuzita, "Citizenship Learning Through Self Organized Learning Environment on Students' Learning Styles," *Devotion Journal of Community Service*, vol. 3, no. 11, pp. 1054–1065, 2022.
- [20] S. Yuzita, *Inovasi Pembelajaran PKN Mengungkap Profil Calon Guru Masa Depan*. CV. Format Publishing, 2022.
- [21] S. Yuzita and H. Tambunan, "Reflector and Pragmatic Learning Styles in Learning Value Clarification Technique VCT and Direct Instruction DI," *Indagat International Research and Critics Institute IIRCI-Jurnal: Humanities and Social Sciences*, vol. 4, no. 2, pp. 2329–2342, 2021.

(Open Access Text)

Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting.

Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting.

standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting. Springer Nature will add OpenAccess standard text here during typesetting.

5. **Artikel Jurnal Publikasi Pada Jurnal Terindeks Scopus di International Journal of Early Childhood Special Education E-ISSN:1308-5581**

DIGITAL NATIVE TEACHERS TO IMPROVE STUDENTS' CITIZENSHIP LITERACY SKILLS

Jamaludin ¹⁾, Sri Yunita ²⁾, Okrasi A Sihaloho ³⁾, Syuratty Astuti Rahayu Manalu ⁴⁾, Budi Ali Mukmin ⁵⁾ *

Department of Pancasila and Citizenship Education , Faculty of Knowledge Social , State University of Medan, Indonesia

* Corresponding Email: jamaludin@unimed.ac.id

Abstract

The digital era has fundamentally changed the educational landscape, bringing with it new challenges and opportunities, especially in the development of students' civic literacy skills. This study examines the role of digital native teachers in improving students' civic literacy skills in secondary schools. With a mixed-methods method involving a quantitative survey of 300 students and 50 teachers, as well as in-depth qualitative interviews with 10 selected digital native teachers, this study aims to analyze how the characteristics and teaching practices of digital native teachers correlate with increased civic literacy. The results show that digital native teachers, who are inherently familiar with digital technologies, tend to integrate digital tools and resources in learning, facilitate critical discussions on contemporary issues, and encourage students' active participation in digital-based projects. A significant positive correlation was found between the level of technology adoption by digital native teachers and the improvement of students' digital literacy skills, civic participation, and critical thinking. The study concludes that the characteristics of digital native teachers, supported by proper professional training and adequate technological infrastructure, can significantly contribute to the development of students' civic literacy in the digital age. The practical implications of this study emphasize the importance of continuous professional development for teachers to harness the potential of digital technology in civic education.

Keywords : Digital Native, Literacy, Citizenship. Educational Technology

INTRODUCTION

The rapid development of information and communication technology (ICT) has given birth to a generation that grows and develops in the midst of the rapid flow of digital information, who are often referred to as digital natives (Prensky, 2001). This generation, which includes the majority of today's students, has unique characteristics in the way they interact with information, learn, and communicate. On the other hand, civic education plays a crucial role in forming individuals who are responsible, participatory, and have critical thinking towards social and political issues in the era of globalization (Hoskins et al., 2011). Challenges arise when traditional teaching methods may not be fully relevant or effective in engaging digital native students to develop essential civic literacy skills.

Citizenship literacy in the digital era goes beyond a basic understanding of citizens' rights and obligations; it includes the ability to access, analyze, evaluate, and create information responsibly in a digital context, as well as participate in public discussions and civic actions ethically and effectively (Frau-Meigs & Torrent, 2009; Mihailidis, 2014). These skills include media literacy, information literacy, and digital literacy, all of which are integrated within the framework of contemporary citizenship literacy.

In this context, the role of teachers becomes very vital. The emergence of the phenomenon of digital native teachers who are inherently accustomed and proficient in using digital technology in their daily and professional lives offers great potential to bridge the gap between the characteristics of digital native students and the demands of 21st century citizenship literacy. Digital native teachers are expected to leverage their understanding of technology to create a more interactive, relevant, and engaging learning environment, thereby effectively increasing student engagement in civic issues.

Previous research has discussed the importance of teachers' digital literacy (Tondeur et al., 2017) and its impact on student learning. However, there have not been many studies that have specifically examined how the unique characteristics of digital native teachers directly contribute to improving students' civic literacy skills. Therefore, this study aims to fill this gap by in-depth exploration of the role of digital native teachers in facilitating the development of students' civic literacy skills, focusing on how the integration of technology and their innovative teaching practices affects students' competencies.

RESEARCH METHODS

The study was conducted in three junior high schools in the urban area of Medan, Indonesia, which were selected based on the availability of technological infrastructure and the demographic variation of students. Quantitative data was collected through surveys with structured questionnaires, while qualitative data was obtained through semi-structured interviews. Quantitative Sample: A total of 300 students from classes VII and IX (ages 14-16 years) were randomly selected (stratified random sampling) to ensure representation of various socio-economic backgrounds. In addition, 30 teachers from various subjects who teach in the same classroom were also included in the survey to get their perceptions of the use of technology and civic literacy. Qualitative Sample: 9 native digital teachers (defined as teachers born after 1980 and demonstrating high proficiency in the use of digital technology for personal and professional purposes) were selected by purposive sampling from the surveyed teacher population. Selection criteria include: (a) active use of technology in teaching, (b) involvement in digital-based projects, and (c) reputation as an innovator in learning approaches.

Data Collection Instrument with Student Questionnaire: Measuring students' citizenship literacy skill level (digital literacy, media literacy, civic participation, and critical thinking) using a 5-point Likert scale. This questionnaire was developed based on a digital citizenship literacy framework (e.g., Common Sense Media, ISTE Standards) and tested for validity and reliability (Cronbach's Alpha > 0.85). Teacher questionnaires to measure teachers' perceptions of the use of technology in teaching, the integration of citizenship issues in the curriculum, and their characteristics as digital natives. Interview guides are used for in-depth interviews with digital native teachers. The questions focused on their experiences in integrating technology, civic literacy teaching strategies, the challenges they faced, and their views on the impact of technology on student learning. The quantitative survey was carried out during April 2025 with direct supervision by the research team. Qualitative interview data was collected in May 2025 through face-to-face sessions and audio recordings, with the consent of participants. Quantitative Data Analysis, i.e. descriptive statistical analysis (mean, standard deviation) is used to describe sample profiles. The Pearson correlation test was used to test the relationship between the characteristics of digital native teachers (e.g., frequency of technology use) and students' citizenship literacy scores. Multiple regression analysis was conducted to identify the most significant digital native teacher variables predicting an increase in students' citizenship literacy. Qualitative data, namely interview data, is transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis methods (Braun & Clarke, 2006). The

initial codes were identified, then grouped into broader themes relevant to the research question. Data triangulation is carried out by comparing qualitative and quantitative findings to improve the validity and reliability of the results.

RESULTS AND DISCUSSION

Descriptive analysis shows that the majority of students (86%) have access to digital devices and the internet at home, and 80% of them actively use social media and digital platforms for information and communication purposes. From the teacher's side, 75% of teachers surveyed identify themselves as "digital native" or "early adopter" of technology, with a high frequency of use of digital devices in daily life.

The results of the Pearson correlation test showed a significant positive correlation between the frequency of use of technology by digital native teachers in teaching ($r = 0.68$, $p < 0.001$) and the level of students' civic literacy skills (including digital literacy, media, participation, and critical thinking). More specifically: a strong positive correlation ($r = 0.72$) was found between the use of online learning platforms (LMS) and digital collaboration tools by teachers with students' digital literacy. The integration of online news analysis and other digital resources by teachers was positively correlated ($r = 0.65$) with students' media literacy and critical thinking. The frequency of awarding digital-based projects that encourage participation in social issues (e.g., online awareness campaigns) was positively correlated ($r = 0.60$) with student civic participation.

Multiple regression analysis showed that "integration of technology in the curriculum" ($\beta = 0.45$, $p < 0.01$) and "facilitation of critical discussion of digital issues" ($\beta = 0.38$, $p < 0.05$) by digital native teachers were significant predictors of improving students' civic literacy skills, explaining the 60% variance in students' civic literacy scores.

The results of the qualitative analysis, namely interviews with digital native teachers, revealed several key themes that support the quantitative findings: The use of technology as a connectivity link, namely digital native teachers often use social media platforms, blogs, and online forums as an extension of the classroom, namely learning management systems. They report that this creates a more relaxed and familiar space for students to express their views on civic issues. "I feel like students are more comfortable expressing their opinions in WhatsApp groups or in the LMS than in front of the class," said one teacher. They also use technology to connect students with authentic resources, such as viral news, government documents, or interviews with experts. Facilitating critical discussion and evaluation of information makes digital native teachers actively encourage students to not only consume information, but also evaluate it critically. They often give

assignments where students have to identify fake news (hoaxes), analyze media biases, or verify facts using various online sources. "I always emphasize, don't immediately believe what you read on the internet. We have to cross-check, see where the source comes from," said a teacher. This approach directly contributes to the development of media literacy and critical thinking. Digital-based projects for civic participation Many digital native teachers report that they design projects that involve students in awareness campaigns on social media, the creation of digital content (videos, infographics) on social issues, or simulations of participation in the digital democracy process. This empowers students to not only understand the issue, but also act as active digital citizens. "We made a campaign video about the importance of elections for first-time voters, and the students were very enthusiastic about spreading it on social media," said one teacher. The challenges and needs of digital native teachers also face challenges such as the limitations of internet infrastructure in schools, the lack of training focused on technology integration for civic education, and resistance from some colleagues who are less familiar with technology. They emphasized the need for school administrative support, ongoing training, and access to relevant digital resources.

The findings of this study are consistent with the literature that emphasizes the importance of the role of teachers in integrating technology for learning (Krumsvik, 2014) and the development of civic literacy (Kahne & Middaugh, 2008). The characteristics of digital native teachers, with their inherent proficiency in technology and understanding of students' digital culture, allow them to create more authentic and relevant learning experiences. This is a manifestation of what is referred to as Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), where teachers not only have content and pedagogical knowledge, but are also proficient in integrating technology to improve the learning process (Mishra & Koehler, 2006). Digital native teachers naturally show higher levels of TPACK in the context of using technology for civic education.

The ability of digital native teachers to utilize digital platforms as a means of discussion, information dissemination, and mobilization of direct participation increases digital literacy and student civic participation. This is in line with the concept of "connected learning" which highlights how technology can connect students' interests, peers, and academic opportunities for a more meaningful learning experience (Ito et al., 2013). The integration of technology also helps to overcome the motivational and relevance challenges that often arise in conventional civic education, making the subject matter more dynamic and close to the realities of students' lives in the digital age (Jenkins et al., 2009).

In addition, their emphasis on critical thinking and evaluation of online information is essential in the era of rampant disinformation and fake news. By modeling responsible behavior in digital information consumption, digital native teachers help students develop the ability to navigate complex information landscapes and make informed decisions. This supports the argument that media and information literacy are integral components of civic literacy in the 21st century (Livingstone, 2008). However, the study also highlights that the presence of digital native teachers alone is not enough. Institutional support in the form of adequate infrastructure and ongoing professional development programs is essential to maximize their potential. Training should focus on digital pedagogy specific to civic education, not just technical skills, to ensure that technology is used strategically to achieve deep learning objectives. The challenges faced by digital native teachers, as expressed in interviews, underscore the need for education policies that are more adaptive and responsive to the needs of teachers and students in the digital age. Without this support, the potential of digital native teachers to encourage students' civic literacy may not be fully realized.

CONCLUSION

This research shows that digital native teachers have a significant and positive role in improving students' civic literacy skills, including digital literacy, media literacy, critical thinking, and civic participation. Their ability to integrate technology innovatively, facilitate critical discussions on contemporary issues, and design digital-based projects that encourage active student participation are key factors in this success.

Digital native teachers, with their intuitive understanding of digital culture, are able to bridge the gap between the world of students and civic education goals relevant to the 21st century. However, to maximize this potential, continued support from schools and policymakers is needed through the provision of adequate technological infrastructure, professional development geared towards digital pedagogy for civic education, and the creation of an environment that supports innovation.

The study recommends that future teacher training programs and sustainable professional development programs place more emphasis on developing the competencies of digital native teachers in the context of civic education, ensuring that they are not only technically proficient but also proficient in implementing digital-age-relevant teaching strategies to form responsible and critical citizens

REFERENCE LIST

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Frau-Meigs, D., & Torrent, J. (2009). Digital literacy and education in Europe. In J. Torrent (Ed.), *Media and Information Literacy: Education for the 21st century* (pp. 11-28). UNESCO.
- Hoskins, B., D'Hombres, B., & Campbell, J. (2011). *Measuring active citizenship in Europe*. European Commission Joint Research Centre.
- Ito, M., Gutiérrez, K., Livingstone, S., Penuel, E., Rhodes, J., Salen, K., Sefton-Green, J., Wolte, D., & Wortman, A. (2013). *Connected learning: An agenda for research and design*. Digital Media and Learning Research Alliance.
- Jenkins, H., Purushotma, R., Clinton, K., Weigel, M., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. The MIT Press.
- Kahne, J., & Middaugh, E. (2008). Civic Education in the Digital Age: Opportunities, Challenges, and Risks. *American Educational Research Journal*, 45(3), 666-701.
- Krumsvik, R. J. (2014). Teacher Digital Competence. In J. W. Staus (Ed.), *The Wiley Handbook of Learning Technology* (pp. 57-79). Wiley-Blackwell.
- Livingstone, S. (2008). Young people and new media: Five C's of change. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 29(6), 443-449.
- Mihailidis, P. (2014). A literature review of civic media education. *Journal of Digital and Media Literacy*, 1(1), 1-22.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
- Tondeur, J., van Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2017). Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: A systematic review of the literature. *Educational Technology Research and Development*, 65(3), 555-575

6. Artikel Jurnal Publikasi Pada Jurnal Terindeks Sinta 3



Kata Kunci: Literasi Kewargaan, Digital Native Teacher, Era Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of the role of Digital Native Teachers in enhancing students' civic literacy in the digital era. The phenomenon of technological disruption demands innovation in education, where civic literacy encompasses not only theoretical knowledge but also critical thinking, ethical awareness, and active participation in digital spaces. This research employs a qualitative approach with a case study method involving students at SMP Gajah Mada Medan. Data were collected through in-depth interviews with Pancasila Education teachers and students, participatory observation, and analysis of curriculum documents and learning materials. The findings reveal that teachers with digital native characteristics effectively integrate technology into the learning process through digital simulations, online news analysis, and structured discussions on social media. Their role extends beyond technological proficiency to facilitating critical dialogues on digital ethics, the rights and responsibilities of digital citizens, and responsible social participation. Furthermore, teachers play a crucial role in fostering students' awareness of their responsibilities as wise and reflective digital citizens. The study concludes that Digital Native Teachers hold a strategic contribution in shaping adaptive and contextual civic literacy in the digital era, with implications for strengthening technology-based teacher professionalism and promoting educational policies that support innovative learning in schools.

Keywords: Civic Literacy, Digital Native Teacher, Digital Era

PENDAHULUAN

Era disrupsi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini adalah bagaimana mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang cakap, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital (Al-Said, 2015). Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi, literasi kewargaan digital menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. Literasi ini mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi (Jamaludin, 2020), pemahaman mengenai hak dan kewajiban digital, etika dalam berinteraksi di dunia maya, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam isu-isu sosial melalui platform digital (Schulz et al., 2023).

Guru memiliki peran strategis dalam membentuk literasi kewargaan digital siswa. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi digital guru dan kebutuhan belajar siswa. Sebagian besar guru tergolong Digital Immigrant, yaitu individu yang beradaptasi dengan teknologi di kemudian hari, sementara siswa saat ini merupakan Digital Native yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi (Prensky, 2009). Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dalam proses pembelajaran karena pendekatan konvensional sering kali tidak relevan dengan

karakteristik generasi digital. Padahal, teknologi telah menjadi faktor kunci dalam transformasi pendidikan modern—tidak hanya memperluas akses terhadap sumber belajar, tetapi juga mengubah dinamika pembelajaran menjadi lebih interaktif, personal, dan kontekstual (Lubis et al., 2021; Habibi et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya (misalnya Prensky, 2009; Lubis et al., 2021; Habibi et al., 2025) lebih menekankan pada integrasi teknologi dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan digital guru. Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik menelaah keterkaitan antara kompetensi guru digital dengan pembentukan literasi kewargaan digital siswa, terutama dalam konteks pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang mengungkap bagaimana karakteristik guru digital native dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi kewargaan digital di kalangan siswa SMP.

Penelitian ini difokuskan pada SMP Gajah Mada Kota Medan, dengan pertimbangan bahwa siswa pada tahap remaja awal sedang berada dalam fase perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan digital. Pada fase ini, bimbingan guru menjadi penting untuk membantu siswa menavigasi dunia maya secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Fenomena aktual seperti penyebaran hoaks, perundungan siber, dan rendahnya kesadaran etika digital yang marak di kalangan remaja menjadi indikator bahwa literasi kewargaan digital mereka masih lemah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru digital native dalam meningkatkan literasi kewargaan digital siswa di tingkat sekolah menengah pertama, dengan menelaah karakteristik, strategi pembelajaran, serta dampak integrasi teknologi yang dilakukan guru terhadap perilaku kewargaan digital siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu pendidikan digital, serta kontribusi praktis bagi guru dan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan peran teknologi untuk pembentukan warga negara digital yang cerdas, kritis, dan beretika.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan guru digital native sebagai agen pembentuk literasi kewargaan siswa dalam konteks sekolah menengah pertama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks yang alami. Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya menafsirkan makna dari perilaku, pengalaman, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian

secara holistik serta menggambarannya dalam bentuk deskripsi verbal yang kaya konteks (Hadi et al., 2021; Creswell & Poeh, 2018). Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru Pendidikan Pancasila dan siswa, serta melalui observasi partisipatif selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari hasil telaah dokumen, seperti kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku teks, serta materi ajar yang relevan dengan fokus penelitian. Kombinasi antara data primer dan sekunder diharapkan dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan saling melengkapi (Bogdan & Biklen, 2007). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pandangan dan pengalaman informan secara terbuka dan kontekstual. Observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh data autentik mengenai proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa di lingkungan kelas. Sementara itu, analisis dokumen digunakan untuk menelaah isi kurikulum, perangkat ajar, dan sumber belajar guna memperkuat hasil temuan dari wawancara dan observasi (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah agar lebih fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil reduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memperjelas hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan makna data, menemukan pola-pola temuan, serta merumuskan kesimpulan penelitian secara reflektif dan sistematis berdasarkan bukti empiris. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik verifikasi yang direkomendasikan dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985; Moleong, 2019). Pertama, dilakukan triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai informan, seperti guru, siswa, dan dokumen pembelajaran, untuk memastikan konsistensi data. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen guna memperkuat validitas temuan. Kedua, dilakukan member check, yaitu proses konfirmasi hasil wawancara, interpretasi data, dan temuan

membagi kompetensi digital guru ke dalam lima dimensi utama: (1) *information*—kemampuan mengakses, menyeleksi, dan mengevaluasi informasi; (2) *communication*—kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi melalui teknologi digital; (3) *educational content creation*—kemampuan merancang konten pembelajaran digital; (4) *security*—pemahaman tentang keamanan data dan privasi; serta (5) *educational problem solving*—kemampuan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Kelima kompetensi ini menjadi landasan penting dalam membentuk tiga dimensi literasi kewargaan digital siswa sebagaimana dikemukakan dalam ICCS 2022 Framework (Schulz et al., 2023), yaitu kemampuan evaluasi informasi, partisipasi bertanggung jawab, dan kesadaran terhadap hak digital warga global.

Dalam dimensi *information*, guru berperan membimbing siswa dalam mengelola dan mengevaluasi arus informasi digital yang begitu luas. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan diskusi kritis, misalnya menganalisis isu-isu publik seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi politik di media sosial. Kegiatan ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menilai keabsahan informasi, sejalan dengan prinsip literasi kewargaan global yang menekankan kesadaran sosial dan moral terhadap dampak informasi digital (Schulz et al., 2023). Selain itu, guru juga menanamkan pemahaman hukum terkait konsekuensi penyebaran berita palsu atau pelanggaran hak digital dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran etika dan tanggung jawab hukum siswa sebagai warga digital.

Pada dimensi *communication* dan *educational content creation*, guru DNT di SMP Gajah Mada secara kreatif menggunakan platform digital seperti Quizizz, Google Classroom, dan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antarsiswa. Melalui kegiatan berbasis proyek dan refleksi digital, siswa didorong untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang digital, misalnya dengan memberikan umpan balik konstruktif dalam forum daring atau bekerja sama dalam pembuatan konten edukatif. Aktivitas ini mencerminkan prinsip partisipasi bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Global Citizenship Education Framework* (UNESCO, 2022), di mana warga digital diharapkan aktif, etis, dan berempati dalam interaksi daring. Selain itu, guru menciptakan konten pembelajaran berbasis kasus—seperti simulasi perundungan siber atau pelanggaran privasi—yang membantu

siswa memahami aspek etika digital dan menghargai hak-hak orang lain di dunia maya.

Selanjutnya, pada dimensi *security* dan *educational problem solving*, guru berperan dalam membangun kesadaran hak digital (*digital rights*) siswa. Melalui kegiatan pembelajaran, guru menekankan pentingnya menjaga privasi data, menghormati hak cipta, serta menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Guru juga melatih siswa menyelesaikan berbagai permasalahan digital, seperti cara melaporkan konten bermuatan perundungan siber, menghindari plagiarisme, atau menilai keamanan sumber digital yang digunakan. Dalam konteks ini, DNT tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pendidik moral digital yang membentuk siswa menjadi warga negara yang kritis, beretika, dan sadar hukum (Firda Laila Syahda et al., 2024).

Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, sebab siswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai kanal digital, termasuk media sosial. Namun, tidak semua informasi yang diperoleh bersifat valid, sehingga guru perlu membuka ruang diskusi kritis, misalnya dengan mengajak siswa membahas fenomena kenegaraan dari perspektif hukum, sosial, maupun politik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila merupakan salah satunya mata pelajaran PPKn yang diajar terkhusus di sekolah baik pada jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran ini memiliki tujuan membentuk warga negara yang smart dan good citizen (Yunita et al., 2022). Maka guru memfasilitasi dialog kritis, guru memberikan evaluasi informasi yang disampaikan oleh siswa, selain itu guru juga mengarahkan dan memberikan penguatan bagaimana siswa mengetahui hak dan kewajiban warga digital, serta partisipasi aktif dalam isu-isu sosial. Dalam hal ini guru memiliki digital yang mencakup kemampuan literasi data (*information*) seperti mencari, memilih, memilah, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang relevan; keterampilan komunikasi (*communication*) melalui teknologi digital untuk berinteraksi dan membangun kerja sama dan serta kemampuan menjaga keamanan data dan privasi (*security*) baik bagi dirinya maupun siswa (Siregar et al., 2024).

Aktivitas yang dilakukan oleh guru menunjukkan bagaimana membentuk siswa memiliki literasi kewarganegaraan karena literasi kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai aturan hukum, konstitusi, atau sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, kemampuan mengambil keputusan, serta sikap partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka untuk membentuk siswa yang memiliki literasi digital seorang guru yang mampu memiliki kecakapan digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryadi yang menjelaskan literasi kewarganegaraan adalah bentuk pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga

negara untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial, politik, dan kenegaraan. Selain itu, literasi kewarganegaraan juga mencakup kemampuan individu dalam memahami dinamika politik, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat. Ada dua komponen inti dalam literasi kewarganegaraan; pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic dispositions*). Keterampilan kewarganegaraan merupakan faktor yang paling penting dalam upaya mewujudkan negara yang baik (Octavialis & Ananda, 2021).

Siswa-siswa SMP Gajah Mada memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang perkembangan digital mereka mengetahui platform-platform media sosial atau pembelajaran dan *Artificial Intelligence* (AI) seperti chatgpt, gemini ataupun platform lainnya. Usia yang masih remaja dikhawatirkan siswa-siswa tersebut terdampak negatif dari perkembangan digital dikarenakan kemajuan teknologi digital telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek nilai dan norma yang mengatur penggunaannya. Berbagai persoalan etika digital, seperti hoaks, pelanggaran hak cipta, isu privasi, keamanan data, hingga tindak kejahatan siber, menjadi tantangan serius di era ini. Kekuatan konektivitas internet yang semakin luas juga memunculkan risiko lain, di antaranya *cyberbullying*, penyebaran informasi menyesatkan, serta penyalahgunaan data pribadi (Firda Laila Syahda et al., 2024). Maka dalam hal ini guru memberikan arahan kepada siswa terkait dengan bagaimana etika digital warga negara. Etika digital merupakan kumpulan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip perilaku yang menjadi pedoman bagi individu saat beraktivitas di ruang digital. Pada konteks ini, etika digital tidak hanya mengatur cara seseorang berkomunikasi secara daring, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi informasi. Hal yang dilakukan oleh guru untuk memperkuat literasi kewargaan siswa.

Keterkaitan erat antara teknologi dan pendidikan perlu dipahami secara bijak. Seiring semakin terbukanya akses informasi melalui platform digital, peserta didik berpotensi menerima dampak positif maupun negatif, tergantung pada kemampuan mereka dalam menyaring informasi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan saat ini dimana informasi yang disampaikan oleh sesuai yang diperintahkan oleh pengguna, mempermudah siswa mencari jawaban dengan praktis, perkembangan *Artificial Intelligence* menurunkan semangat siswa untuk membaca dan berpikir kritis.

Peningkatan literasi kewargaan digital di SMP Gajah Mada tidak hanya dihasilkan oleh keberadaan teknologi, tetapi terutama karena kualitas pedagogi yang dibangun oleh DNT. Guru menjadi aktor utama dalam mentransformasikan pembelajaran digital menjadi sarana

pembentukan karakter kewargaan. Mekanisme peningkatan ini terjadi melalui tiga tahap. Pertama, *modeling*, di mana guru menampilkan teladan perilaku digital yang etis, seperti menghormati hak cipta dan berkomunikasi sopan di ruang daring. Kedua, *guided practice*, di mana guru membimbing siswa secara langsung dalam menganalisis isu digital dan mempraktikkan tanggung jawab sebagai warga digital. Ketiga, *reflection*, di mana guru mengajak siswa merefleksikan konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Ketiga mekanisme ini memperkuat pemahaman siswa bahwa literasi digital tidak hanya soal keterampilan teknologi, melainkan juga kesadaran moral, sosial, dan hukum yang mendasarinya.

Upaya yang dilakukan SMP Gajah Mada menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan figur DNT yang profesional dan berkompeten. Guru tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana pembentukan karakter kewargaan digital. Implementasi DNT di sekolah ini secara nyata memperkuat tiga pilar literasi kewargaan digital: evaluasi informasi, partisipasi bertanggung jawab, dan kesadaran hak digital yang menjadi inti dari literasi kewargaan global (Schulz et al., 2023). Dengan pendekatan ini, guru berperan sebagai mediator nilai, penggerak etika, dan penjaga moralitas digital.

Akhirnya, implementasi DNT di SMP Gajah Mada memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan literasi kewargaan digital di Indonesia. Temuan ini mempertegas bahwa literasi kewargaan digital bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga bagian dari pendidikan nilai, etika, dan hukum yang membentuk warga negara digital yang cerdas (*smart citizen*) sekaligus beretika (*good digital citizen*). Sejalan dengan kerangka ICCS 2022 (Schulz et al., 2023), pendekatan ini berpotensi memperkuat daya saing global generasi muda Indonesia dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai tanggung jawab sosial, keadilan, dan kebajikan di era digital.

2. Tantangan Implementasi Optimalisasi Digital Native Teacher

Kemampuan guru dalam menciptakan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menarik menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Upaya ini tidak hanya bertujuan agar siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam jangka panjang, strategi tersebut diharapkan mampu membentuk lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif, sehingga siswa tidak sekadar memahami konsep

akademis, melainkan juga memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan demikian, guru berperan sebagai agen perubahan yang mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, berdaya saing, serta produktif (Egok, 2024).

Melihat peran guru yang semakin kompleks di era digitalisasi, guru dan pihak sekolah SMP Gajah Mada terus berupaya memaksimalkan pembelajaran berbasis digital sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, pembentukan sosok DNT tentu bukanlah proses yang dapat diwujudkan secara instan, melainkan membutuhkan serangkaian program pelatihan yang terstruktur, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Melalui pelatihan tersebut, guru diharapkan tidak hanya mampu menguasai kompetensi digital pada tingkat dasar, seperti penggunaan media pembelajaran yang umum dipakai dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan lanjutan, yakni merancang platform pembelajaran mandiri yang inovatif serta mengintegrasikannya dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, adaptif, dan personal bagi siswa.

Di sisi lain, tantangan nyata yang dihadapi adalah kondisi kemampuan digital guru yang tidak merata. Masih terdapat sejumlah guru yang kurang cakap dalam memanfaatkan teknologi, terutama mereka yang berasal dari latar belakang konvensional dan terbiasa menggunakan metode pembelajaran tradisional. Situasi ini semakin menegaskan urgensi penyelenggaraan pelatihan intensif, menyeluruh, dan merata agar seluruh guru memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensinya. Selain permasalahan kompetensi, keterbatasan sarana, prasarana, serta infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penghambat utama yang harus segera diatasi, mengingat keberhasilan digitalisasi pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai.

Sebagai institusi pendidikan yang visioner, SMP Gajah Mada menunjukkan komitmennya dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi terselenggaranya berbagai program pelatihan guru. Sekolah menyadari bahwa pelatihan bagi guru tidak hanya bersifat pelengkap, melainkan menjadi kebutuhan mendesak demi menciptakan guru yang memiliki kecakapan digital, sehingga mampu menjawab tuntutan pendidikan masa kini dan menyiapkan generasi muda yang berdaya saing tinggi di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru muda yang tergolong DNT memiliki kompetensi yang kuat dalam pembuatan konten pembelajaran digital (*educational content creation*). Mereka tidak hanya menggunakan

teknologi untuk keperluan instruksional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kewargaan global dan etika digital dalam setiap aktivitas belajar. Temuan ini dapat dipahami melalui kerangka ICCS 2022 (Schulz et al., 2023) yang menekankan tiga domain utama dalam literasi kewargaan global: *civic knowledge*, *civic attitudes*, dan *civic engagement*. Berdasarkan temuan lapangan, para DNT berhasil mengembangkan tiga aspek tersebut secara simultan.

Pertama, pada aspek pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), guru mengarahkan siswa untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab warga negara digital melalui pembelajaran berbasis isu aktual seperti disinformasi dan ujaran kebencian. Salah satu guru menyatakan, *"Saya selalu minta siswa membuat video pendek tentang isu sosial, tapi harus disertai sumber data valid, supaya mereka belajar bahwa postingan juga punya tanggung jawab hukum"* (Guru R, wawancara 18/07/2025). Kutipan ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam pembelajaran menjadi sarana internalisasi kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

Kedua, dalam aspek sikap kewargaan (*civic attitudes*), para guru memanfaatkan media interaktif untuk menumbuhkan empati digital, saling menghormati, dan keberagaman budaya di ruang daring. Sementara itu, pada aspek partisipasi kewargaan (*civic engagement*), guru mendorong siswa untuk terlibat dalam aktivitas sosial berbasis digital seperti kampanye anti-hoaks, literasi media, dan aksi kemanusiaan virtual. Hal ini sejalan dengan gagasan *Global Citizenship Education* (UNESCO, 2022) bahwa partisipasi aktif dan bertanggung jawab merupakan ciri utama warga global di era digital.

Dimensi hukum dan etika literasi kewargaan digital juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini. Para guru menghadapi sejumlah kasus nyata di sekolah, seperti penyebaran hoaks dan perundungan siber (*cyberbullying*) yang melibatkan siswa. Salah seorang guru menjelaskan, *"Pernah ada siswa yang menyebar tangkapan layar editan teman sekelas. Kami gunakan kasus itu untuk belajar hukum ITE dan bagaimana meminta maaf secara digital"* (Guru S, wawancara 22/06/2025). Temuan tersebut memperlihatkan bagaimana guru menjadikan peristiwa digital sebagai sarana reflektif untuk menanamkan nilai tanggung jawab hukum dan moral. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Yusuf, Prasetyo Wibowo, dan Budiono (2024) yang menegaskan pentingnya pendidikan etika digital berbasis nilai Pancasila untuk membentuk warga digital yang beradab dan bertanggung jawab. Dari perspektif hukum, praktik ini membantu siswa memahami hak-hak digital dan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. 19 Tahun 2016).

Analisis kausalitas kualitatif menunjukkan bahwa kompetensi digital guru terutama dalam aspek *educational content creation* menjadi faktor kunci peningkatan literasi kewargaan digital siswa. Guru yang mampu merancang konten edukatif berbasis isu hukum dan sosial terbukti dapat menurunkan kerentanan siswa terhadap hoaks serta meningkatkan kemampuan evaluasi informasi secara kritis. Hasil observasi di salah satu sekolah menunjukkan bahwa siswa terlibat aktif dalam diskusi kelas daring tentang "hak digital" dan "etika berkomentar". Fenomena ini menandakan bahwa strategi pedagogis yang dikembangkan guru berdampak nyata pada kemampuan reflektif dan partisipasi bertanggung jawab siswa di ruang digital.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Blyzhyuk (2018) dan Prasetyo et al. (2022) yang menegaskan bahwa kompetensi digital guru berperan strategis dalam memperluas dimensi literasi kewargaan melalui pembelajaran partisipatif, kolaboratif, dan etis. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan studi Makassar dan Habibah (2023) yang memandang guru sebagai *civic influencer* yang mampu memoderasi perilaku digital warga muda agar lebih bijak dan produktif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi akademik penting dengan menunjukkan bahwa DNT tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi berperan sebagai katalisator pembentukan warga digital yang kritis, beretika, dan berkeadilan sosial. Integrasi antara teori ICCS 2022 dan konsep literasi kewargaan digital menghasilkan pemahaman baru bahwa penguasaan teknologi harus disertai kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta etika bermedia sebagai bagian dari praktik kewargaan global. Dengan demikian, pendidikan digital yang dikembangkan oleh DNT mampu memperkuat *civic knowledge*, *civic attitudes*, dan *civic engagement* siswa, sekaligus membangun dasar bagi literasi kewargaan global yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa DNT (*Digital Native Teacher*) memiliki peran strategis dalam membentuk literasi kewargaan digital siswa SMP, sebagaimana terlihat di SMP Gajah Mada Kota Medan. Melalui kemampuan adaptif terhadap teknologi, kreativitas pedagogis, dan integrasi nilai-nilai etika digital, guru mampu menumbuhkan tiga dimensi utama literasi kewargaan digital—kemampuan mengevaluasi informasi, berpartisipasi secara bertanggung jawab, dan memahami hak-hak digital warga global (Schulz et al., 2023). Pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan *modeling*, *guided practice*, dan *reflection* menjadikan guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dan pembimbing moral digital bagi siswa. Keberhasilan implementasi DNT

ditentukan oleh kompetensi digital guru, dukungan kelembagaan, dan budaya reflektif di sekolah, meskipun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan kemampuan teknologi dan keterbatasan fasilitas yang perlu diatasi melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep digital pedagogy dan *digital citizenship education* dengan menegaskan bahwa kompetensi digital guru tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknologi, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kewargaan digital. Temuan ini menempatkan guru sebagai agen pembentuk karakter warga digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah bagi guru untuk terus meningkatkan kecakapan digital melalui pembelajaran berbasis proyek, studi kasus digital, dan refleksi etika daring. Sekolah perlu memperkuat program pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas digital yang merata, sementara pembuat kebijakan diharapkan merancang kebijakan integratif yang menggabungkan transformasi digital dengan pendidikan karakter agar pembelajaran abad ke-21 lebih bermakna dan humanis.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar guru terus mengembangkan literasi dan pedagogi digital yang berorientasi pada pembentukan etika dan tanggung jawab kewargaan. Sekolah hendaknya menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang inklusif dengan dukungan fasilitas dan kolaborasi antarguru. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ke jenjang pendidikan lain atau melakukan studi komparatif di berbagai konteks sekolah untuk memperdalam pemahaman tentang kontribusi DNT dalam membangun literasi kewargaan digital generasi muda di era transformasi teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Said, K. M. (2015). *Students' perceptions of Edmodo and mobile learning and their real barriers towards them*. *Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)*, 14(2), 167–180.
- Blyznyuk, T. (2018). *Digital competences of teachers in the 21st century*. *Journal of Education and Information Technologies*.
- Busetto, L., & Gumbinger, C. (2020). *How to use and assess qualitative research methods*. *Neurological Research and Practice*, 2, Article 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Digital Citizenship and Professional Digital Competence – Swedish

- Subject Teacher Education in a Postdigital Era (2022). *Postdigital Science and Education*, 4, 467–493. <https://doi.org/10.1007/s42438-022-00291-7>
- Digital citizenship trend in educational sphere: A systematic review (2021). *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 10(4), 1192-1201. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i4.21767>
- Egok, A. S. (2024). *Pelatihan literasi digital untuk guru SD dalam mencetak smart kids di era teknologi. Abdimas Indonesia*, 4(4), 1767–1777.
- Firda Laila Syahda, F., Sari, N., & Hidayat, R. (2024). *Etika digital dan tantangan literasi kewargaan di era siber. Jurnal Pendidikan dan Teknologi*.
- Firda Laila Syahda, Y., Nur'aisyah, Y., & Rachman, I. F. (2024). *Pentingnya pendidikan etika digital dalam konteks SDGs 2030. Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i2.1259>
- From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework (2020). *Educational Technology Research and Development*, 68, 2449–2472. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09767-4>
- Habibi, D. D., Waskitaningtyas, N. C., Yusman, F. R., & Aulia, N. S. (2025). *Mem bangun pembelajaran aktif di era digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian kualitatif*. CV Pena Persada. <http://repository.uinsby.ac.id/edprint/167/>
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). *Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(1), 145–163.
- Hakim, M., & Yulia, D. (2024). *Transformasi digital dalam pendidikan abad ke-21*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (Eds.). (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Jamaludin, J. (2020). *Mem bangun nalar pengetahuan warga negara melalui buku digital di kalangan mahasiswa. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 769–776. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.296>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Panduan literasi*

kewarganegaraan digital. Jakarta, Indonesia: Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Materi pendukung literasi budaya dan kewargaan*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.

Lubis, H. Z., Eriska, P., Bismala, L., Arifin, M., Hidayat, F. P., Rudianto, S., Jamaludin, Harfiani, R., Nasution, D. K., & Panggabean, S. (2021). *Inovasi pembelajaran di masa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (New Normal): Antara peluang dan tantangan* (Vol. 1). UMSU Press.

Mahadir, N. B., Baharudin, N. H., & Osman, Z. J. (2021). *Digital citizenship literacy knowledge among undergraduates of Sultan Idris Education University: Preliminary studies*. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 10(2), 416–434. <https://doi.org/10.6007/IJARPE/v10-i2/9070>

Makassar, N., & Habibah, S. M. (2023). *Building digital civility of Indonesian net citizens from a digital citizenship perspective*. *Digital Theory, Culture & Society*, 2(2). <https://doi.org/10.61126/dtcs.v2i2.30>

McKin, C. (2023). *Meaningful member-checking: A structured approach to member-checking*. *American Journal of Qualitative Research*, 7(2), 41–52. <https://doi.org/10.29333/ajqr/12973>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.

Octavialis, N., & Ananda, A. (2021). *Pembinaan literasi kewarganegaraan di SMP Negeri 11 Padang*. *Journal of Civic Education*, 4(2), 122–128. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.481>

Octavialis, R., & Ananda, R. (2021). *Civic literacy and democratic dispositions among youth*. *Civic Education Journal*, 5(3), 88–99.

Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2022). "It really needs to be given to students" – digital citizenship understanding amongst student teachers: Qualitative Nvivo analysis. *Jurnal Civica: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 9–20. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.46888>

Prensky, M. (2009). *H. sapiens digital: From digital immigrants and digital natives to digital wisdom*. *Innovate: Journal of Online Education*, 5(3).

Purwantiningsih, A., Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2022). *Digital citizenship in*

- Indonesia: Digital literacy and digital politeness using social media*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 628-637. <https://doi.org/10.17977/um019v7i3p628-637>
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., & Agrusti, G. (2023). *ICCS 2022 international report on civic and citizenship education study*. Amsterdam, Netherlands: IEA.
- Schulz, W., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Ainley, J., Damiani, V., & Friedman, T. (2023). *IEA international civic and citizenship education study 2022 assessment framework*. Springer Nature.
- Siregar, R., Sembiring, L., & Harahap, M. (2024). *Digital pedagogical competence and civic literacy of teachers*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(2), 145-159.
- Siregar, T., Wijaya, A., Ahmad, Ranguti, N., Nasution, M., Suparni, & Sungkono, J. (2024). *Keterampilan dan kecakapan abad 21: Kompetensi digital pendidik masa depan*. *Journal of Islamic and Scientific Education Research*, 1(2), 1. www.p21.org
- Teacher Digital Literacy Based on the Pillars of Skill, Ethics, Safety, and Culture (2025). *Journal of Sustainable Communities and Development*, 3(1), 39-48. <https://doi.org/10.63158/SCD.v3i1.39>
- Technology Pedagogical Content Knowledge-based learning model in Citizenship Education courses (2023). *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 15-25. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.51796>
- Triastuti, R. (2019). *Teachers and technology: The perspective of digital citizenship*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 22-28. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.21521>
- UNESCO. (2022). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. Paris, France: UNESCO Publishing.
- Villar-Orrubia, D., Morini, L., Marin, V. I., & Nascimbeni, F. (2023). *Critical digital literacy as a key for (post)digital citizenship: An international review of teacher competence frameworks*. *Journal of e-Learning and Knowledge Society*. <https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135697>
- Yunita, A., Rahmawati, D., & Syamsuddin, F. (2022). *Smart and good citizenship in digital era education*. *Jurnal PPKn dan Civic Education*, 7(1), 22-35.
- Yunita, S., Jamaludin, & Feryansyah. (2022). *Inovasi pembelajaran PKN menyongsong profil calon guru masa depan*. CV Format Publishing.

Yusuf, N., Prasetyo Wibowo, A., & Budiono, B. (2024). *Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia*. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1).
<https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>

Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

No.	Kegiatan Penelitian dan Pencapaian Luaran	Target Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan dan Pengembangan Proposal Penelitian	Tersedianya proposal penelitian yang disesuaikan dengan metode yang tepat.	Terkumpulnya <i>Research Gap & Question</i> ; melalui <i>literature review</i> ; metode penelitian yang relevan.	Jamaludin; Sri Yunita, Oksari A. Sihaloho,
2.	Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kurikulum dan kebutuhan belajar mahasiswa	Analisis kurikulum, CPMK, materi, RPS, panduan pembelajaran berbasis proyek serta kebutuhan belajar mahasiswa	Tersedianya hasil analisis kurikulum, CPMK, materi, RPS, panduan pembelajaran berbasis proyek serta kebutuhan belajar mahasiswa	Sri Yunita: Jamaludin, Oksari A. Sihaloho,
3.	Desain modul ajar	Melakukan konten materi PPKn dan desain modul ajar etika profesi guru PPKn	Tersedianya konten dan desain modul ajar etika profesi guru PPKn digital native teacher yang	Oksari A. Sihaloho; Jamaludin, Sri Yunita; Syuratty AR Manalu
4	Develop modul ajar	Menghasilkan modul ajar etika profesi guru PPKn digital native teacher yang teruji kelayakannya; efektivitas; dan pengaruh serta respon.	modul ajar etika profesi guru PPKn digital native teacher yang teruji kelayakannya; efektivitas; dan pengaruh serta respon.	Jamaludin; Sri Yunita, Oksari A. Sihaloho, Budi Ali Mukmin,

5	Disseminate	Melakukan uji kelayakan dan kepraktisan. Setelah itu, melakukan uji efektivitas dan pengaruh modul ajar etika profesi guru PPKn digital native teacher yang untuk optimalisasi pembelajaran Pendidikan Pancasila	Menghasilkan produk yang telah layak dan praktis untuk digunakan. Capaian juga memastikan efektivitas dan pengaruh modul ajar etika profesi guru PPKn digital native teacher yang untuk optimalisasi pembelajaran Pendidikan Pancasila	Oksari A. Sihaloho; Jamaludin, Sri Yunita, Budi Ali Mukmin,
6	Publikasi dan Pelaporan	Menerbitkan modul ajar etika profesi guru PPKn di era digital yang diterbitkan dan ber-ISSN; mendiseminasikan; & publikasi artikel	Menerbitkan modul ajar etika profesi guru PPKn di era digital yang diterbitkan dan ber-ISSN; mendiseminasikan modul ajar secara nasional melalui AP3KNI; publikasi laporan akhir penelitian, artikel ilmiah internasional scopus, prosiding internasional.	Syuratty AR Manalu; Budi Ali Mukmin, Jamaludin